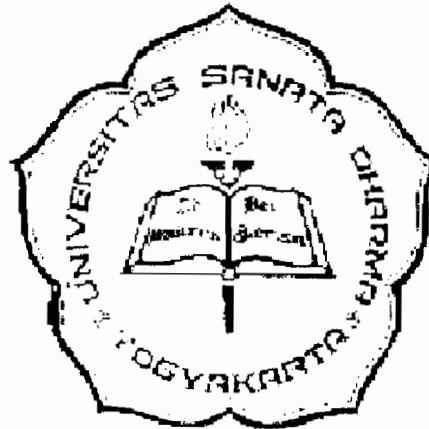


**PERANAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Yovita Roseva

NIM : 992114264

NIRM : 9900511211303120264

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

Skripsi

PERANAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004)

Oleh:

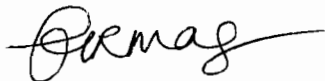
Yovita Roseva

NIM : 992114264

NIRM : 9900511211303120264

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing I



(Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.)

Tanggal 12 Desember 2005

Pembimbing II



(Dionysius Desembriarto, S.E., M.Si.)

Tanggal 30 Januari 2005

Skripsi
PERANAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004)

dipersiapkan dan ditulis oleh :

Nama : Yovita Roseva
NIM : 992114264
NIRM : 9900511211303120264

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2006
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M. M., Akt.

Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M. Si., Akt

Anggota : Firma Sulistiyowati, S. E., M. SI

Anggota : Dionysius Desembriarto, S. E., M. Si.

Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the panel members]

Yogyakarta, 28 Februari 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



[Handwritten signature]
Drs. Alex Kahu Lantum, M. S.



PERSEMBAHAN

Terlahir dari sebuah doa, perjuangan, dan pengorbanan

Skripsi ini saya persembahkan :

- ♥ *Tritunggal Maha Kudus serta Bunda Maria.*
- ♥ *Bapak Avellinus Apo, B.A dan Mamak Irawati, serta
Abang, Kakak, dan Adikku, Alfredo, Rosnaini,
Purnando dan PH. Lina yang tercinta.*
- ♥ *Cornelius Wiji Wirahardi, Kekasihku.*



MOTTO

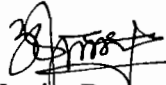
- ♣ Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur
Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan.
(Mazmur 37 : 37).
 - ♣ Cinta yang dalam tidak memperhitungkan
- Cinta hanya memberi.
(Bunda Teresa).

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Februari 2006

Penulis



Yovita Roseva

ABSTRAK

**PERANAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004)**

YOVITA ROSEVA

NIM : 992114264

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2006

Penelitian ini bertujuan untuk (1). Mengetahui bagaimana perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah; (2). Mengetahui apakah penerimaan dari retribusi daerah dari tahun 2001 sampai dengan 2004 sudah efektif dan efisien. (3). Mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis proporsi, analisis kontribusi, dan analisis efektivitas dan efisiensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah mengalami kenaikan; (2). Penerimaan retribusi daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 tidak efektif, sedangkan tingkat efisiensi sangat besar, karena di atas standar ratio biaya pemungutan; (3). Kontribusi daerah kepada Pendapatan Asli Daerah sangat besar, karena hampir seluruh pendapatan daerah dari retribusi daerah.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE REGIONAL RETRIBUTION TO THE IMPROVEMENT OF THE REGIONAL ORIGINAL REVENUE

(A Case Study at Sintang Regency Government, West Borneo
in the year of 2001 - 2004)

YOVITA ROSEVA

NIM: 992114264

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA 2006

This research aimed at (1). Knowing how the development of proportion of each retribution to the regional retribution; (2). Knowing whether the income from the regional retribution in year 2001 to year of 2004 was already effective and efficient; (3). Knowing how big was the contribution of the regional retribution to the improvement of the regional original revenue in the year of 2001 to year of 2004.

The techniques of data collection used observation, interview and documentation. Whereas the data analysis techniques used were proportion analysis, contribution analysis, and effectiveness and efficiency analysis.

The result of the research suggested that (1). The proportion of each retribution to the regional retribution was increasing; (2). The regional retribution income from the year of 2001 to year of 2004 was not effective, whereas the level of efficiency was significant, because it was over the standard of collection cost ratio; (3). The contribution retribution to the regional original revenue was significant, because almost all of the regional revenue were derived from regional retribution.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat dan berkatnya. Setelah melalui beberapa tahap dalam proses studi di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, penulis mendapat kesempatan untuk melaksanakan skripsi dengan judul **Peranan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004).**

Skripsi merupakan salah satu mata kuliah yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebagai syarat akhir untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana antara satu dan lainnya saling tergantung. Berdasarkan kalimat di atas, maka tentunya dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas bantuan tersebut penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E.,M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan saran, koreksi dan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

4. Bapak Dionysius Desembriarto, S.E.,M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt, selaku dosen penguji yang telah berkenan untuk memberikan masukan dan saran demi perbaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama kuliah. Tuhan Memberkati.
7. Kepala dan Karyawan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kab. Sintang yang telah memberikan segala data yang diperlukan dengan sabar.
8. Kepala dan Karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Sintang yang telah memberikan segala data yang diperlukan
9. Bapak dan Mamak tercinta di tanah Borneo, terima kasih banyak atas pengertiannya, cinta kasihnya, serta doa dan dukungan moril maupun materiil yang telah diberikan. Tuhan Memberkati
(akan kupersembahkan yang terbaik buat kalian).
10. Bang Apet, terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materiil (maaf.....hanya ini yang bisa kupersembahkan, semoga dilain waktu dapat memberikan yang lebih baik lagi, Tuhan akan membalas kebaikan hati Abang), Kak Ukek, Bang Pandop dan De' Uchiek terima kasih atas

persaudaraan dan kekompakkan kita yang begitu indah, penuh kasih dan cinta, walaupun sering bertengkar hehe.... Tuhan memberkati.

11. Cornelius Wiji Wirahasdi, kekasihku, teman terbaik dalam hidupku, permata hatiku yang selalu mengisi hari-hariku dan selalu menemaniku, terimakasih atas supportnya, doa dan cintanya. Tuhan Memberkati.

12. Teman-teman kost BD4, Tantular 119 Puren, Kepuh GK III/876 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

(Terima kasih Persahabatan yang indah). Tuhan Memberkati.

13. Teman-teman selama kuliah AKT'D 99', teman-teman MPT *(heee....akfirmnya)* Makasih karena kalian udah banyak bantuin aku belajar dan pinjaman bukunya. Tuhan Memberkati.

14. Selama merantau aku tidak pernah merasa sendirian, karena didekatku selalu ada sahabat-sahabatku "Keluarga Besar Dayak Kal-Bar" di Jogja.
Tuhan Memberkati.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga saya berikan kepada semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan, semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan dengan limpahan rahmatNya kepada kita semua.

Yogyakarta, 2006

Penyusun

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xij
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5

BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Pendapatan Asli Daerah.....	7
B. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	7
1. Pajak Daerah.....	7
2. Retribusi Daerah.....	8
3. Bagian Laba Usaha Daerah.....	12
4. Penerimaan Dinas.....	12
5. Dana Perimbangan.....	12
6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	12
C. Efektivitas dan Efisiensi.....	13
1. Efektivitas.....	13
2. Efisiensi.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
A. Jenis Penelitian.....	15
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	15
C. Subjek Penelitian.....	15
D. Objek Penelitian.....	15
E. Data yang diperlukan.....	15
F. Teknik Pengumpulan Data.....	16
G. Teknik Analisis Data.....	16
BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.....	19
A. Sejarah.....	19
B. Pemerintahan.....	20

C. Keadaan Geografi.....	22
1. Letak Wilayah.....	22
2. Batas Wilayah.....	22
3. Pembagian Wilayah.....	23
4. Luas Wilayah.....	23
D. Fasilitas.....	25
1. Pendidikan.....	25
2. Kesehatan.....	25
3. Peribadatan.....	25
E. Penduduk.....	26
1. Jumlah Penduduk.....	26
2. Komposisi Penduduk.....	26
3. Kepadatan Penduduk.....	27
4. Angkatan Kerja.....	27
F. Kekayaan Alam.....	28
1. Jenis Tanah.....	28
2. Pemanfaatan Tanah.....	28
G. Ekonomi.....	31
1. Sektor Pertanian.....	31
2. Sektor Industri.....	31
3. Sarana Perhubungan.....	32
4. Sektor Pariwisata.....	32
5. Sektor Perdagangan.....	33

H. Sumber Daya Alam.....	33
I. Kondisi Umum Pendapatan Daerah.....	34
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Analisis Proporsi Masing-Masing Retribusi.....	35
B. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	47
C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi.....	49
1. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah.....	49
2. Analisis Efisiensi Biaya Pemungutan Retribusi Daerah.....	51
BAB VI PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Keterbatasan Penelitian.....	55
C. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	58
Lampiran 2. Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2001.....	61
Lampiran 3. Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.....	68
Lampiran 4. Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2003.....	80
Lampiran 5. Laporan Target Setelah Perubahan dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2004.....	85
Lampiran 6. Surat Keterangan Ijin Penelitian dan selesai penelitian.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Letak Geografi Kab. Sintang.....	22
Tabel 4.2. Letak Administratif Letak Geografi Kab. Sintang.....	22
Tabel 4.3. Banyaknya Desa/Kelurahan di Kab. Sintang.....	23
Tabel 4.4. Luas Wilayah Kab. Sintang Menurut Kecamatan pada tahun 2003.....	24
Tabel 4.5. Komposisi Jumlah Penduduk Kab. Sintang Menurut Jenis Kelamin pada tahun 2003.....	26
Tabel 5.1. Proporsi masing-masing Retribusi terhadap Retribusi Daerah pada tahun 2001.....	36
Tabel 5.2. Proporsi masing-masing Retribusi terhadap Retribusi Daerah pada tahun 2002.....	37
Tabel 5.3. Proporsi masing-masing Retribusi terhadap Retribusi Daerah pada tahun 2003.....	38
Tabel 5.4. Proporsi masing-masing Retribusi terhadap Retribusi Daerah pada tahun 2004.....	39
Tabel 5.5 Peranan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kab. Sintang pada tahun 2001 sampai dengan 2004	48
Tabel 5.6. Efektivitas Retribusi Daerah Kab. Sintang pada tahun 2001 sampai dengan 2004	50
Tabel 5.7. Efisiensi Biaya Pemungutan Retribusi Daerah Kab. Sintang pada tahun 2001 sampai dengan 2004	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	58
Lampiran 2. Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2001.....	61
Lampiran 3. Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.....	68
Lampiran 4. Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2003.....	80
Lampiran 5. Laporan Target Setelah Perubahan dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2004.....	85
Lampiran 6. Surat Keterangan Ijin Penelitian dan selesai penelitian.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan yang mengakibatkan keterpurukan diberbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Dalam upaya mengatasi krisis tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan, salah satunya ialah memberlakukan otonomi daerah karena dewasa ini kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten masih tergantung pada penerimaan yang berasal dari pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri maka setiap daerah dituntut untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerahnya sebagai sumber penerimaan daerah akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan dibidang keuangan daerah diupayakan pemantapannya searah dengan tujuan jangka panjang pembangunan nasional yaitu agar keuangan daerah semakin berperan dalam meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat serta swasta, dan memperluas kesempatan kerja.

Keuangan daerah diperoleh dari beberapa sumber penerimaan dan menurut Undang-undang no.25 tahun 2000, sumber utama penerimaan daerah terdiri dari empat sumber yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Dari keempat sumber penerimaan daerah tersebut yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari perpajakan daerah, retribusi dan pendapatan lainnya dengan melakukan pencatatan dan pendaftaran wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah kurang berperan.
2. Semua pajak utama dan tinggi nilainya ditarik oleh pemerintah pusat.
3. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan hanya sedikit.
4. Kelemahan dalam pemberian subsidi.

Retribusi daerah sendiri dianggap sebagai salah satu komponen penting yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena retribusi merupakan pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya

hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut (Suparmoko, 1992:84). Dari keadaan tersebut maka pemerintah daerah harus mengetahui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan sumbangan tinggi dalam meningkatkan daerahnya, salah satunya adalah dari penerimaan retribusi daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah?
2. Apakah penerimaan dari retribusi daerah pada tahun 2001 sampai tahun 2004 sudah efektif dan efisien?
3. Seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi pada retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, serta penulis juga akan melihat peranan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah secara keseluruhan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan dari retribusi daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 sudah efektif dan efisien.

3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama dalam hal penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan memberi masukan bagi pihak-pihak yang berminat dengan topik retribusi daerah.

3. Bagi Penulis

Dari penelitian ini penulis mendapatkan pengetahuan dibidang keuangan daerah dan dapat menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan keadaan yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas tentang keadaan ekonomi daerah yang mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh rendahnya sumber penerimaan daerah. Selain itu juga dibahas tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengikutsertakan peran masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan

daerah. Dari latar belakang tersebut, dilanjutkan dengan merumuskan masalah tentang proporsi retribusi bagi pendapatan asli daerah serta tentang batasan masalah, manfaat penelitian dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori yang dipakai dalam melakukan penelitian. Pembahasan berupa uraian tentang kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumbernya serta dasar hukumnya dalam perekonomian daerah. Selain itu juga dibahas sekilas tentang pajak dan uraian tentang retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Sintang.

Bab III : Metode Penelitian

Pembahasan pada bab ini meliputi penjelasan tentang jenis penelitian berupa studi kasus yang dilakukan ditempat penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Sintang dan uraian tentang waktu penelitian. Pembahasan selanjutnya yaitu obyek penelitian yang berupa data retribusi dan data Pendapatan Asli Daerah. Kemudian teknik pengumpulan data yang dibahas adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab IV : Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sintang

Pembahasan yang dilakukan meliputi sejarah pembentukan Kabupaten Sintang, kapan terbentuk, batas wilayah, luas wilayah, dan sekilas tentang perkembangannya sampai pada saat ini.

Bab V : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini dibahas mengenai perhitungan proporsi masing-masing retribusi. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya menghitung masing-masing retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil perhitungan ditulis dalam bentuk tabel-tabel. Dengan tabel tersebut selanjutnya dapat dilakukan analisis efektif dan keefisienan pemungutan retribusi.

Bab VI : Penutup

Pada bab ini dibahas kesimpulan dan saran serta keterbatasan yang dapat diambil setelah hasil penghitungan dan analisis data selesai dibuat serta berisi beberapa saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan (Devas, 1989:31).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (Wijaya, 2001:42).

B. Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

a. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah Undang-Undang No.34 tahun 2000.

b. Pengertian

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan biaya rumah tangga daerah tersebut (Mardiasmo, 1996).

c. Jenis-jenis Pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran/ Rumah Makan
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

d. Ciri-ciri Perpajakan Daerah

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibanding ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil
3. Dasar pengenaan pajak merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan membayar.
4. Balas jasa tidak dapat dinikmati secara langsung

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut (Suparmoko, 1992:84).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Soetrisno, 1993:139).

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksa dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk paksaan yang dimaksud bersifat ekonomis, karena siapa yang tidak merasakan jasa balik pemerintah maka tidak dikenakan iuran (Munawir, 1992:4).

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang diperhatikan (Samudra, 1995:50):

- 1). Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pemungutan yang dikenakan
- 2). Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan
- 3). Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pemungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan

Retribusi daerah merupakan pendapatan yang tidak kecil didalam mengisi keuangan daerah, sedangkan bagi masyarakat merupakan suatu beban, karena mempunyai arti penting bagi semua pihak maka berlakunya peraturan tentang retribusi daerah perlu pengesahan dahulu oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam peraturan daerah.

b. Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah (Kaho, 1997:25)

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang
2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis

3. Adanya balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Dikenakan dalam setiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh negara atau pemerintah.

c. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Tata cara pemungutan retribusi daerah berdasarkan UU no.18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah adalah:

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan surat tagihan retribusi daerah.

a. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan UU no.34 tahun 2000, tentang perubahan atas UU no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Pemerintah no.66 tentang retribusi daerah, Pemerintah kabupaten memungut tiga golongan retribusi :

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perijinan tertentu

e. Jenis- jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten

Sintang

No	Jenis Retribusi Daerah	Obyek Pengenaan
1.	Pelayanan Kesehatan	Dikenakan kepada individu atau badan yang memperoleh layanan kesehatan pada dinas kesehatan, rumah sakit, rumah balai pengobatan dan laboratorium kesehatan
2	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh layanan pembuangan sampah
3	Penggantian Biaya Cetak KTP/KK	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan jasa KTP/KK
4	Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan jasa catatan sipil
5	Penggantian Biaya Cetak Peta	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan penggantian biaya cetak peta
6	Pelayanan Pasar	Dikenakan kepada individu/badan yang menggunakan fasilitas pasar umum
7	Pengujian Kendaraan Bermotor	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor
8	Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	Dikenakan kepada pribadi/badan yang menggunakan fasilitas atau aset milik pemerintah daerah kabupaten dan perluasan objek tersebut seperti sewa mesin gilas dan GOR
9	Jasa Usaha Terminal	Dikenakan kepada individu/badan yang menggunakan fasilitas terminal umum
10	Ijin Mendirikan Bangunan	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh fasilitas perijinan bangunan baik mendirikan maupun merobohkan bangunan
11	Ijin Gangguan	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan perijinan gangguan, baik untuk industri, pertokoan, pasar atau pergudangan maupun usaha sosial.
12	Ijin Trayek	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh pelayanan perijinan trayek, baik ijin trayek baru, perubahan ijin trayek maupun perpanjangan ijin trayek
	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Dikenakan kepada individu/badan yang memanfaatkan sumber daya alam seperti, kayu, rotan, dan sumber mata air.
14	Ijin Usaha Jasa Kontruksi	Dikenakan kepada individu/badan yang memperoleh ijin usaha jasa kontruksi
15	Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal	Dikenakan kepada individu/ badan yang memperoleh ijin usaha pelayanan pelabuhan kapal
16	Jasa Usaha Pasar Grosir dan atau Pertokoan	Dikenakan kepada individu /badan yang memperoleh jasa usaha pasar grosir dan atau mendirikan pertokoan.

3. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari BPD dan Perusahaan Daerah.

4. Penerimaan Dinas

Penerimaan dari dinas-dinas menurut Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang pokok pemerintahan daerah adalah penerimaan dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Misalnya Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Badan Pertanahan, dan lain-lain.

5. Dana Perimbangan

Yang termasuk dalam dana perimbangan adalah:

- a. Bagian dari Pajak Bumi Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Dana Alokasi Umum (DAU)
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- e. Penerimaan dari sumber daya alam

6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan lain-lain yang termasuk di dalamnya adalah:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Penerimaan jasa giro
- c. Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah

- d. Bantuan keuangan untuk kabupaten atau kota
- e. Penerimaan lain-lain.

C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua macam kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat tanggung jawab tertentu. Efektivitas dan efisiensi biasanya bersifat relatif atau kompartif dan bukan bersifat absolut dalam arti bahwa efisiensi biasanya dibandingkan dengan suatu ukuran tertentu. Misalnya antara pusat pertanggungjawaban yang satu dibandingkan dengan pusat pertanggungjawaban yang lain, atau prestasi sesungguhnya suatu pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan standar atau anggaran, atau prestasi suatu pusat pertanggungjawaban masa kini dibandingkan dengan masa sebelumnya.

1. Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan retribusi daerah dan potensi hasil retribusi daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya pungutan retribusi daerah digunakan asumsi sebagai berikut :

- a. Apabila realisasi penerimaan retribusi daerah semakin besar terhadap target retribusi daerah maka dapat dikatakan pemungutan retribusi semakin efektif.
- b. Apabila realisasi penerimaan retribusi daerah semakin kecil terhadap target retribusi daerah maka dapat dikatakan pemungutan retribusi kurang efektif.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila ratio yang dicapai minimal sebesar 100%. Semakin tinggi ratio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Mardiasmo, 2002:129).

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari suatu unit input yang digunakan (Anthony, dkk, 1993:202). Efisiensi (daya guna) digunakan untuk mengukur bagian dari hasil retribusi daerah yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi daerah. Untuk menentukan efisien tidaknya pemungutan retribusi daerah digunakan tolok ukur efisiensi dengan membandingkan angka ratio yang diperoleh dengan standar ratio pemungutan retribusi daerah sebesar 5% dari realisasi, cara pengukurannya :

- a. Apabila ratio yang diperoleh masih di bawah standar ratio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa biaya pemungutan retribusi daerah efisien.
- b. Apabila ratio yang diperoleh melampaui standar ratio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan retribusi daerah kurang efisien.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus, yaitu peneliti mengadakan penelitian terhadap obyek dan data tertentu pada waktu tertentu. Kesimpulan dari hasil penelitian hanya berlaku bagi obyek bersangkutan dan dalam waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sintang
- b. Pada bulan April - Juli 2005

C. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).

D. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah retribusi daerah dan data pendapatan asli daerah.

E. Data yang diperlukan

1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Sintang
2. Data Retribusi Daerah
3. Data Pendapatan Asli Daerah

F. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian sehubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada subyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif.

1. Permasalahan pertama

Analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah dilakukan dengan menggunakan rumus (Suparmoko, 1984) :

$$\text{Proporsi retribusi} = \frac{\text{besar retribusi}}{\text{total retribusi daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

Proporsi retribusi : Prosentase jenis suatu retribusi terhadap keseluruhan retribusi daerah

Besar retribusi : Besarnya suatu jenis retribusi (retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi kesehatan dan lain-lainnya).

Total retribusi : jumlah total retribusi daerah pada tahun anggaran tertentu

Rencana tabel untuk proporsi jenis retribusi terhadap total retribusi daerah :

No.	Jenis Retribusi	Besar Penerimaan Retribusi	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah (%)

2. Permasalahan kedua

Untuk mengetahui apakah penerimaan dari retribusi daerah sudah efektif dan efisien digunakan rumus (Mardiasmo, 2002:129):

a. Efektivitas Retribusi Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Target retribusi daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas retribusi daerah ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Rencana tabel efektivitas retribusi daerah adalah :

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Target Retribusi Daerah	Efektivitas (%)
Rata-rata			

b. Efisiensi Biaya Pemungutan Retribusi Daerah

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{biaya pemungutan retribusi daerah}}{\text{realisasi retribusi daerah}} \times 100\%$$

Efisiensi retribusi daerah ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Rencana tabel efisiensi biaya pemungutan retribusi daerah adalah :

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	Relisasi Retribusi Daerah	Tingkat Efisiensi (%)
Rata-rata			

3. Permasalahan ketiga

Untuk mengetahui seberapa besar peranan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus (Mardiasmo, 2002) :

$$\text{Kontribusi retribusi daerah} = \frac{\text{realisasi retribusi daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Data yang dibutuhkan adalah :

- 1). Penerimaan retribusi daerah dan realisasinya pada setiap tahun anggaran
- 2). Data Pendapatan Asli Daerah

Rencana tabel untuk berapa besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi (%)
Rata-rata			

BAB IV
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG

A. Sejarah Pembentukan Kabupaten Sintang

Daerah Sintang, pada masa pemerintahan Belanda (sekitar tahun 1936) merupakan daerah landschop di bawah naungan pemerintahan Gouvernement. Daerah landschop ini terbagi menjadi 4 onderafdeling yang dipimpin oleh seorang controleur atau gesagkekber, yaitu:

1. Onderafdeling Sintang, berkedudukan di Sintang
2. Onderafdeling Melawi, berkedudukan di Nanga Pinoh
3. Onderafdeling Semitau, berkedudukan di Semitau.
4. Onderafdeling Boeven Kapuas, berkedudukan di Putussibau

Sedangkan daerah kerajaan Sintang yang didirikan oleh Demang Irawan (Jubair I) dijadikan daerah swapraja Sintang dan kerajaan Tanah Pinoh dijadikan Neo Swapraja Tanah Pinoh. Pemerintahan landschop ini berakhir pada tahun 1942 dan kemudian tampuk pemerintahan diambil alih oleh Jepang.

Pada masa pemerintahan Jepang ini, struktur pemerintahan yang berlaku tidak mengalami perubahan hanya sebutan wilayah kepala pemerintahan yang disesuaikan dengan bahasa negara yang memerintah ketika itu. Kepala negara disebut Kenkarikan (semacam bupati sekarang) sedangkan wakilnya disebut Bunkenkarikan dan di setiap kecamatan diangkat Gunco (kepala daerah).

Setelah adanya pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia, kekuasaan Pemerintahan Belanda yang disebut afdeling Sintang diganti dengan Kabupaten Sintang, onderafdeling diganti dengan Kewedanan, Distric diganti dengan Kecamatan. Demikian pula halnya dengan jabatan Residen diganti dengan Bupati, Kepala distric diganti dengan Camat dan yang menjadi Bupati Sintang pada waktu itu adalah bapak L. Toding.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Undang Undang no.3 tahun 1953, Undang Undang no.25 tahun 1956 dan Undang Undang no.4 tahun 1956 tentang pembentukan DPRD dan DPR peralihan, maka pada tanggal 27 Oktober 1956 dilaksanakanlah pelantikan keanggotaan DPRD peralihan Kabupaten Sintang. Selanjutnya sesuai Ketetapan Presiden no.6 tahun 1959 tanggal 6 Nopember 1959, maka azas dekonsentrasi dan desentralisasi sebagai realisasi pelaksanaan Undang Undang no.3 tahun 1953 dihimpun kembali dalam 1 tangan Bupati Kepala Daerah yang dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang Undang no.18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Selain itu, dengan instruksi Menteri Dalam Negeri no.3 tahun 1966 tanggal 1 Pebruari 1966 jalannya roda pemerintahan daerah di seluruh Indonesia mulai diarahkan dan disempurnakan.

B. Pemerintahan

Kabupaten Sintang yang dikepalai oleh seorang bupati, wilayahnya dibagi menjadi 21 kecamatan yaitu :

1. Sokan
2. Tanah Pinoh

3. Sayan
4. Ella Hilir
5. Menukung
6. Serawai
7. Ambalau
8. Kayan Hulu
9. Nanga Pinoh
10. Belimbing
11. Sepauk
12. Tempunak
13. Dedai
14. Kayan Hilir
15. Sintang
16. S. Tebelian
17. Binjai Hulu
18. Kelam Permai
19. Ketungau Hilir
20. Ketungau Tengah
21. Ketungau Huiu.

Tiap kecamatan dikepalai oleh seorang camat. Berdasarkan data Kantor Statistik Kabupaten Sintang pada tahun 2003 Kabupaten Sintang terdiri dari 21 kecamatan yang terbagi menjadi 247 desa, 6 kelurahan dan 876 Dusun. Jadi terdapat 4 desa tambahan dimana 2 desa merupakan desa persiapan berdasarkan

SK Bupati dan 2 desa lagi merupakan desa pengembangan. Sementara berdasarkan data kantor PMD Sintang 4 Desa tambahan tersebut belum dimasukkan sehingga jumlah Desa/kelurahan masih seperti tahun sebelumnya yaitu 243 desa dan 6 kelurahan dengan 867 Dusun, dimana terdapat 123 Desa/kelurahan adalah desa swasembada dan 126 desa/kelurahan swakarya.

C. Keadaan Geografis

1. Letak Wilayah

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terbesar kedua di Propinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang. Secara geografis Kabupaten Sintang terletak diantara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 yang menggambarkan letak geografi Kabupaten Sintang.

Tabel 4.1
Letak Geografi Kabupaten Sintang

Letak Geografi	Keterangan
Lintang	1 ⁰ 05' Lintang Utara 1 ⁰ 21' Lintang Selatan
Bujur	110 ⁰ 50' Bujur Timur 113 ⁰ 20' Bujur Timur

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Sintang

2. Batas Wilayah

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Sintang adalah :

Tabel 4.2
Letak Administratif Kabupaten Sintang

Letak Geografi	Keterangan
Sebelah Utara	Malaysia Timur (Serawak) dan Kabupaten Kapuas Hulu
Sebelah Selatan	Propinsi Kalimantan Tengah
Sebelah Timur	Propinsi Kalimantan Timur
Sebelah Barat	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Sintang

3. Pembagian Wilayah

Secara administratif Kabupaten Sintang sampai dengan tahun 2003 terdiri dari 21 kecamatan yang terbagi menjadi 251 desa 6 kelurahan dan 891 dusun, dimana 116 desa/kelurahan adalah desa swasembada dan 141 desa/kelurahan swakarya. Banyaknya kecamatan, desa/kelurahan dan dusun tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Banyaknya Desa/Kelurahan
di Kabupaten Sintang Tahun 2003

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun
1.	Sokan	8	-	31
2.	Tanah Pinoh	11	-	44
3.	Sayan	7	-	26
4.	Ella Hilir	8	-	26
5.	Menukung	9	-	35
6.	Serawai	12	-	44
7.	Ambalau	9	-	26
8.	Kayan Hulu	14	-	48
9.	Nanga Pinoh	22	-	77
10.	Belimbing	16	-	53
11.	Sepauk	16	-	55
12.	Tempunak	18	-	66
13.	Dedai	16	-	62
14.	Kayan Hilir	13	-	44
15.	Sintang	4	6	15
16.	Sungai Tebelian	19	-	57
17.	Kelam Permai	10	-	48
18.	Binjai Hulu	8	-	25
19.	Ketungau Hilir	9	-	32
20.	Ketungau Tengah	13	-	51
21.	Ketungau Hulu	9	-	28
	Kabupaten Sintang	251	6	891

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Sintang

4. Luas Wilayah

Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah 32.279 Km² atau 21,99 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang pada tahun 2003 terbagi menjadi 21 kecamatan, 6 kelurahan dan 251

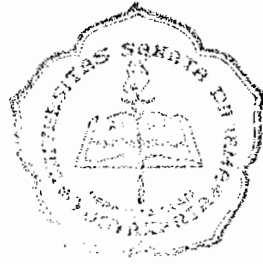
desa, kecamatan terluas adalah kecamatan Ambalau dengan luas 19,79% Kabupaten Sintang, sedangkan luas masing-masing kecamatan hanya berkisar 2-7% dari luas Kabupaten Sintang.

Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel 4.4 yang menggambarkan luas wilayah Kabupaten Sintang menurut kecamatan.

Tabel 4.4
Luas Wilayah Kabupaten Sintang
Menurut Kecamatan
Pada tahun 2003

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Sokan	1.577,20	4,89
2.	Tanah Pinoh	1.568,30	4,86
3.	Sayan	1.166,40	3,61
4.	Ella Hilir	1.139,80	3,53
5.	Menukung	1.062,10	3,29
6.	Serawai	2.127,50	6,59
7.	Ambalau	6.386,40	19,78
8.	Kayan Hulu	937,50	2,90
9.	Nanga Pinoh	2.438,20	7,55
10.	Belimbing	1.692,00	5,24
11.	Sepauk	1.825,70	5,66
12.	Tempunak	1.027,00	3,18
13.	Dedai	694,10	2,15
14.	Kayan Hilir	1.136,70	3,52
15.	Sintang	277,05	0,86
16.	Sungai Tebelian	256,50	1,63
17.	Kelam Permai	253,80	1,62
18.	Binjai Hulu	307,65	0,95
19.	Ketungau Hilir	1.544,50	4,78
20.	Ketungau Tengah	2.182,40	6,76
21.	Ketungau Hulu	2.138,20	6,62
	Kabupaten Sintang	32.279,00	100,00

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Sintang



D. Fasilitas

1. Pendidikan

Jumlah sarana dan prasarana belajar mengajar pada tahun 2003 di Kabupaten Sintang terdapat 33 unit TK, 545 sekolah tingkat SD terbagi dalam 515 SD Negeri dan 30 SD Swasta dengan tenaga pengajar sejumlah 3.644 orang, 85 sekolah tingkat SLTP yang terdiri dari SLTP Negeri dan SLTP Swasta, dan 37 sekolah tingkat SLTA yang terdiri dari SLTA Negeri dan SLTA Swasta, dan terdapat 1 Universitas.

2. Kesehatan

Pada tahun 2003 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sintang berjumlah 285 unit yang terdiri dari 3 rumah sakit, 5 balai pengobatan, 23 puskesmas (9 puskesmas dengan rawat inap dan 19 tanpa rawat inap), 114 puskesmas pembantu, 32 puskesmas keliling dan 254 polindes.

3. Peribadatan

Menurut data Kantor Departemen Agama Kabupaten Sintang pada tahun 2003, jumlah penganut agama Islam tercatat sebesar 44,11%, Katolik 30,29%, Protestan 20,55%, Hindu 0,09% dan Budha 0,26%, sedangkan yang 4,75% adalah penganut kepercayaan. Jumlah prasarana peribadatan di Kabupaten Sintang tidak mengalami perubahan atau masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.477 buah tempat ibadah.

E. Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pencatatan registrasi penduduk sampai dengan tahun 2003 penduduk kabupaten sintang mencapai 486.014 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2000-2003 tercatat rata-rata 1,81%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2002 yang mencapai 2,02% pertahun.

2. Komposisi Penduduk

Ditinjau dari jenis kelaminnya, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Sintang mempunyai jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya, tabel 4.5. menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.5.
Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2003

No.	Kecamatan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sokan	6.718	6.727	13.445
2.	Tanah Pinoh	12.121	11.811	23932
3.	Sayan	7.426	7.236	14.662
4.	Ella Hilir	7.117	6.957	14.074
5.	Menukung	8.509	8.159	16.668
6.	Serawai	10.667	10.186	20.853
7.	Ambalau	7.148	6.697	13.845
8.	Kayan Hulu	10.786	10.540	21.326
9.	Nanga Pinoh	24.523	23.558	48.081
10.	Belimbing	13.194	12.267	25.461
11.	Sepauk	21.212	19.642	40.854
12.	Tempunak	12.333	11.273	23.606
13.	Dedai	12.480	11.876	24.356
14.	Kayan Hilir	11.593	11.024	22.617
15.	Sintang	25.171	24.803	50.520

No.	Kecamatan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
16.	Sungai Tebelian	13.161	12.432	25.539
17.	Kelam Permai	7.060	6.785	13.845
18.	Binjai Hulu	5.380	5.087	10.467
	Jumlah	248.937	237.077	486.014

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Sintang

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2003 sebesar 1.850 jiwa/desa. Jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 39 orang/desa. Penyebaran penduduk di tiap kecamatan belum berimbang, terlihat beberapa Kecamatan yang sebaran penduduknya tinggi dan beberapa diantaranya sangat rendah. Kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Sintang sebesar 140 orang per km² dan kepadatan terendah terjadi di Kecamatan Ambalau sebesar 2 orang / km².

4. Angkatan kerja

Angkatan kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, yaitu sebagai sarana produksi. Tenaga kerja lebih penting dari pada sarana produksi yang lainnya. Ketenagakerjaan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah penduduk usia kerja (PUK) pada tahun 2003 tercatat 374.029 orang. Kalau dilihat dari perkembangan penduduk yang mencari pekerjaan selama lima tahun terakhir, maka pada tahun 2003 hanya sebanyak 856 orang laki-laki dan 830 orang perempuan. Selanjutnya untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kantor

Departemen Tenaga Kerja selama tahun 2003 sebesar 1.686 orang. Dari seluruh tenaga kerja yang terdaftar pada tahun 2003 disalurkan sebanyak 285 orang, ini berarti sama dengan jumlah yang disalurkan pada tahun 2002. Pencari kerja terbanyak yang terdaftar rata-rata berpendidikan terakhir SMTA tetapi di samping itu masih terdapat juga tenaga kerja yang hanya lulusan SD atau bahkan belum tamat SD.

F. Kekayaan Alam

1. Jenis Tanah

Dilihat dari tekstur tanahnya maka sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah podsolit yang meliputi areal sebesar 1,34 juta Ha atau sekitar 41,56% dari luas daerah 3,23 juta Ha. Selanjutnya tanah latosol sekitar 1,08 juta Ha atau 33,30% yang terhampar hampir di seluruh kecamatan.

2. Pemanfaatan Tanah

a. Tanaman Pangan

Hasil pembangunan di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan manfaatnya sudah dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Untuk itu, produksi pangan baik beras maupun non beras perlu terus ditingkatkan guna lebih memantapkan swasembada pangan. Di samping itu juga ditujukan untuk memperbaiki mutu gizi masyarakat melalui penganekaragaman aneka jenis makanan.

Sub sektor tanaman pangan khususnya produksi tanaman pokok di Kabupaten Sintang selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Total produksi padi di Kabupaten Sintang pada tahun 2003 mencapai 20,40% dari tahun

sebelumnya. Sedangkan untuk tanaman palawija produksinya ada yang mengalami peningkatan ada pula yang mengalami penurunan. Produksi tanaman palawija yang mengalami peningkatan yaitu jagung dan ubi kayu.

b. Perkebunan

Peningkatan produksi perkebunan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama keperluan industri perlu terus dikembangkan melalui upaya peremajaan dan rehabilitasi penganekaragaman komoditi, pemanfaatan lahan kering dan lahan transmigrasi serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna.

Pada tahun 2003 produksi tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan luas areal tanam. Produksi terbesar tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Sintang berasal dari tanaman kelapa sawit, produksinya jauh meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 6,78%. Setelah tanaman kelapa sawit disusul tanaman karet yang produksinya cukup berperan yaitu sebesar 41.653 ton.

c. Peternakan

Peningkatan produksi ternak, unggas dan hasil-hasilnya untuk mencukupi permintaan dalam negeri perlu terus dikembangkan guna menuju swasembada protein, peningkatan penyediaan konsumsi protein hewani dan sekaligus sebagai komoditi ekspor.

Pada tahun 2003 populasi ternak rata-rata mengalami peningkatan kecuali ternak kerbau dan babi. Untuk ternak kerbau yang tergolong dalam ternak besar

mengalami penurunan sebesar 0,70% dan untuk ternak babi yang tergolong ternak kecil mengalami penurunan sebesar 4,7%, sedangkan ternak unggas terdiri dari ayam dan itik mengalami peningkatan. Ternak ayam terdiri dari ayam ras dan ayam buras masing-masing mengalami peningkatan sebesar 40,22% dan 3,76% sedangkan itik mengalami peningkatan sebesar 1,98%.

d. Perikanan

Pada tahun 2003, produksi perikanan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan sebesar 0,50% dimana 65,11% produksi berasal dari perairan umum dan sisanya dari budidaya kolam dan keramba. Produksi ikan terbesar adalah jenis ikan jambal yang terdapat di perairan umum dengan jumlah tangkapan sebesar 220,1 ton.

c. Kehutanan

Kabupaten Sintang dengan luas 3,23 juta Ha merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 21,99% dari luas kawasan hutan propinsi Kalimantan Barat.

Luas kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2001 terdiri dari 3,72% hutan PPA, 21,08% hutan lindung, 31,38% hutan produksi terbatas, 12,99% hutan produksi biasa, 0,14 % hutan produksi yang dapat dikonversikan, dan 30,69%.

Hasil hutan terbesar adalah kayu bulat (log). Produksi kayu bulat berdasarkan ijin pemungutan asal kayu tersebut ada dari hak perusahaan 192.929,7 m³ dan Hak Pemungutan Hasil Hutan 333.367,77 m³.

G. EKONOMI

1. Sektor Pertanian

Sub sektor tanaman pangan khususnya produksi tanaman pokok di Kabupaten Sintang selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Total produksi padi di Kabupaten Sintang pada tahun 2003 mencapai 20,40% dari tahun sebelumnya. Dari hasil produksi tersebut 17.394 Ha ditanam di lahan sawah dengan rata-rata produksi sebesar 23,33 Kw/Ha dan 40,756 Ha ditanam pada bukan lahan sawah dengan rata-rata produksi sebesar 15,85 Kw/Ha. Luas panen dan produksi padi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Untuk luas panen meningkat sebesar 8,82% dan produksinya meningkat 2,81%.

Sebaliknya, untuk produksi dan luas panen tanaman palawija pada tahun 2003 rata-rata mengalami penurunan kecuali tanaman kacang tanah dan ubi kayu, hal ini disebabkan musim kemarau yang berkepanjangan dan kabut asap yang cukup tebal.

2. Sektor Industri

Sektor industri dibedakan atas industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Penggolongan ini berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terdapat di perusahaan yang bersangkutan.

- a. Industri besar adalah perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih
- b. Industri sedang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang
- c. Industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19

- d. Industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5.

Sampai tahun 2003 di Kabupaten Sintang terdapat industri kecil dan rumah tangga yang berjumlah 654 unit usaha yang mana mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1545 orang. Dari 654 unit usaha 36,85% adalah industri formal sedangkan sisanya adalah industri nonformal. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah industri formal meningkat 13% yaitu dari 213 usaha menjadi 241 Unit Usaha yang berarti tenaga kerja yang dapat diserap juga mengalami peningkatan. Untuk industri non formal hanya mengalami peningkatan 0,4%.

3. Sarana Perhubungan

a. Perhubungan Darat

Sesuai perkembangan teknologi dan pembangunan perekonomian yang semakin mantap, peranan jasa angkutan darat yang ditunjang dengan kondisi dan jenis permukaan jalan yang baik perlu lebih ditingkatkan sehingga mobilitas penduduk dan perdagangan antar daerah dapat berjalan dengan lancar.

b. Perhubungan Udara

Jumlah penumpang angkutan udara pada tahun 2003 yang berangkat maupun yang datang melalui Bandar Udara Susilo Sintang mengalami penurunan sebesar 39,96% sedangkan jumlah penumpang yang datang turun sebesar 19,01%.

4. Sektor Pariwisata

Keberadaan sub sektor pariwisata dewasa ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian daerah, terutama sekali dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Untuk itu tersedianya hotel atau akomodasi yang cukup memadai akan dapat menunjang

kegiatan sub sektor tersebut. Di Kabupaten Sintang pada tahun 2003 terdapat 20 hotel, terdapat Taman Wisata Alam Baning, Taman Nasional Bukit Baka atau Bukit Raya, Taman Wisata Alam Bukit Kelam, Danau Jemelak dan Kebiau dan Air Terjun Nokanayan.

5. Sektor Perdagangan

Kegiatan perekonomian di Kabupaten Sintang secara konkrit lebih cenderung didominasi oleh sektor perdagangan. Jumlah wajib daftar perusahaan pada tahun 2003 secara keseluruhan mengalami peningkatan 31,78%, yaitu dari 322 perusahaan pada tahun 2002 menjadi 471 perusahaan pada tahun 2003. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa tingkat perekonomian di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan dari tahun 2002 ke tahun 2003.

Pada tahun 2003 jumlah arus barang yang masuk ke Kabupaten Sintang (6.513 ton) lebih besar dibanding dengan arus barang yang keluar (792 ton). Secara ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2003 lebih cenderung mengkonsumsi barang-barang dari luar wilayah .

H. Sumber Daya Alam

Kabupaten Sintang kaya akan hasil pertanian sehingga penduduknya bermata pencarian petani. Pada sektor pertanian tanaman pangan terbesar adalah padi, jagung kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar dan menunjang kebutuhan disektor industri yaitu karet dan kelapa sawit. Pada sektor peternakan meliputi unggas, babi, kerbau, sapi dan kambing.

I. Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 memiliki struktur anggaran yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana peranan daripada Bantuan Pemerintah Pusat atau yang dikenal dengan Dana Perimbangan. Peranan sumber Pendapatan Asli Daerah walaupun terus dipicu peningkatannya, namun kontribusinya terhadap APBD relatif masih sangat kecil sekali. Kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD antara lain disebabkan meningkatnya dana perimbangan secara lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Peranan dari masing-masing sumber penerimaan daerah yang ada di Kabupaten Sintang selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 :

1. Pendapatan Asli Daerah :

- Pajak daerah
- Retribusi daerah
- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Dana Perimbangan

- Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus
- Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sintang untuk mengetahui proporsi, seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan dari retribusi daerah apakah sudah efektif dan efisiensi. Tentunya data utama yang diperlukan adalah daftar realisasi Pendapatan Asli Daerah yang memuat data-data realisasi penerimaan setiap retribusi pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004.

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sangat mempengaruhi penerimaan daerah. Data realisasi retribusi daerah dapat menunjukkan tingkat kemampuan daerah pada bidang keuangan.

Retribusi yang dipungut Kabupaten Sintang pada tahun 2001 berjumlah 15 jenis retribusi, tahun 2002 berjumlah 16 jenis retribusi, tahun 2003 berjumlah 18 jenis retribusi dan pada tahun 2004 berjumlah 23 jenis retribusi. Penambahan jenis retribusi tiap tahun anggaran disebabkan karena adanya ekstensifikasi retribusi yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah penerimaan daerah.

A. Analisis Proporsi Masing-masing Retribusi

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah digunakan rumus :

$$\text{Proporsi retribusi} = \frac{\text{besar retribusi}}{\text{total retribusi daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

Proporsi retribusi : Prosentase jenis suatu retribusi terhadap keseluruhan retribusi daerah.

Besar retribusi : Besarnya suatu jenis (retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi kesehatan dan lain-lainnya).

Total retribusi : Jumlah total retribusi daerah pada tahun anggaran tertentu.

Hasil perhitungan proporsi retribusi pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat pada tabel 5.1 sampai dengan tabel 5.4 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Proporsi Masing-masing Retribusi Terhadap Retribusi Daerah
Tahun 2001

No	Jenis Retribusi	Besar Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah (%)
1.	Pelayanan kesehatan	408.530.580,00	44,81
2.	Pelayanan persampahan/kebersihan	115.334.800,00	12,65
3.	Penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil	63.096.500,00	6,92
4.	Parkir ditepi jalan umum	6.323.000,00	0,69
5.	Pelayanan pasar	92.370.400,00	10,13
6.	Pengujian kendaraan bermotor	-	-
7.	Penggantian biaya cetak peta	-	-
8.	Pemakaian kekayaan daerah	92.256.000,00	10,12
9.	Pasar grosir dan atau pertokoan	-	-
10.	Jasa usaha terminal	48.940.100,00	5,37
11.	Tempat penginapan/pasangrahan/ villa	9.713.500,00	1,07
12.	Rumah potong hewan	-	-
13.	Ijin mendirikan bangunan	63.780.000,00	7,00
14.	Ijin gangguan	-	-
15.	Ijin travek	11.372.500,00	1,25
16.	Ijin penggamblian hasil hutan ikutan	-	-
17.	Penyeberangan diatas air	-	-
18.	Penggantian biaya cetak akte catatan sipil	-	-
19.	Jasa usaha pemakaian kekayaan daerah.	-	-
20.	Jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal	-	-
	Total retribusi daerah	911.717.475,00	100,00

Sumber data: BPKKD Kab. Sintang

Tabel 5.2
Proporsi Masing-masing Retribusi Terhadap Retribusi Daerah
Tahun 2002

No	Jenis Retribusi	Besar Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah (%)
1.	Pelayanan kesehatan	547.165.470,00	36,18
2.	Pelayanan persampahan/ kebersihan	107.781.250,00	7,13
3.	Penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil	227.904.000,00	15,07
4.	Parkir ditepi jalan umum	8.812.000,00	0,58
5.	Pelayanan pasar	75.153.600,00	4,97
6.	Pengujian kendaraan bermotor	-	-
7.	Penggantian biaya cetak peta	4.080.000,00	0,27
8.	Pemakaian kekayaan daerah	174.681.950,00	11,55
9.	Pasar grosir dan atau pertokoan	46.812.300,00	3,10
10.	Jasa usaha terminal	47.824.500,00	3,16
11.	Tempat penginapan/pasanggrahan/villa	44.332.055,00	2,93
12.	Rumah potong hewan	1.050.000,00	0,07
13.	Ijin mendirikan bangunan	109.549.149,00	7,24
14.	Ijin gangguan	96.894.185,00	6,41
15.	Ijin trayek	20.283.400,00	1,34
16.	Ijin pengambilan hasil hutan ikutan	-	-
17.	Penyeberangan diatas air	-	-
18.	Penggantian biaya cetak akte catatan sipil	-	-
19.	Jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	-	-
20.	Jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal	-	-
	Total Retribusi Daerah	1.512.323.859,00	100,00

Sumber data: BPKKD Kab. Sintang

Tabel 5.3
Proporsi Masing-masing Retribusi Terhadap Retribusi Daerah
Tahun 2003

No	Jenis Retribusi	Besar Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah (%)
1.	Pelayanan kesehatan	712.285.912,00	42,32
2.	Pelayanan persampahan/ kebersihan	94.318.250,00	5,60
3.	Penggantian biaya cetak KTP dan KK	135.033.500,00	9,09
4.	Pelayanan parkir ditepi jalan umum	5.171.000,00	0,31
5.	Pelayanan pasar	41.259.650,00	2,45
6.	Pengujian kendaraan bermotor	35.252.200,00	2,09
7.	Penggantian biaya cetak peta	-	-
8.	Jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	192.013.600,00	11,41
9.	Jasa usaha pasar grosir dan atau pertokoan	66.112.000,00	3,93
10.	Jasa usaha terminal	50.634.700,00	3,01
11.	Tempat penginapan/pasanggrahan/villa	-	-
12.	Rumah potong hewan	-	-
13.	Ijin mendirikan bangunan	121.475.018,00	7,22
14.	Ijin gangguan	68.707.827,50	4,08
15.	Ijin trayek	12.592.700,00	0,75
16.	Penggantian biaya cetak akte catatan sipil	102.726.000,00	6,10
17.	Ijin usaha jasa kontruksi	4.650.000,00	0,28
18.	Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum Koperasi	7.650.000,00	0,45
19.	Ijin bengkel umum dan modifikasi kendaraan bermotor	92.400,00	0,01
20.	Jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal	15.312.350,00	0,91
	Total Retribusi Daerah	1.683.287.107,50	100,00

Sumber data: BPKKD Kab. Sintang

Tabel 5.4
Proporsi Masing-masing Retribusi Terhadap Retribusi Daerah
Tahun 2004

No	Jenis Retribusi	Besar Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Proporsi Retribusi Terhadap Retribusi Daerah (%)
1.	Pelayanan kesehatan	4.497.657.538,00	79,56
2.	Pelayanan persampahan/ kebersihan	102.792.500,00	1,82
3.	Penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil	178.480.000,00	3,16
4.	Parkir ditepi jalan umum	6.619.300,00	0,12
5.	Pelayanan pasar	35.255.000,00	0,62
6.	Pengujian kendaraan bermotor	37.728.000,00	0,67
7.	Penggantian biaya cetak peta	-	-
8.	Pemakaian kekayaan daerah	157.591.740,00	2,79
9.	Jasa usaha pasar grosir dan atau pertokoan	82.377.200,00	1,46
10.	Jasa usaha terminal	38.031.000,00	0,67
11.	Tempat penginapan/pasanggrahan/villa	-	-
12.	Rumah potong hewan	-	-
13.	Ijin mendirikan bangunan	146.429.830,00	2,59
14.	Ijin gangguan	66.488.485,00	1,18
15.	Ijin trayek	11.095.500,00	0,20
16.	Ijin pengambilan hasil hutan ikutan	-	-
17.	Penyeberangan diatas air	-	-
18.	Penggantian biaya cetak akte catatan sipil	103.601.000,00	1,83
19.	Jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	157.591.756,00	2,79
20.	Jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal	11.177.700,00	0,20
21.	Ijin usaha jasa konstruksi	5.050.000,00	0,09
22.	Pendirian dan pengelolaan badan hukum koperasi	14.562.803,00	0,26
23.	Ijin bengkel umum dan modifikasi kendaraan bermotor	508.500,00	0,01
Total Retribusi Daerah		5.653.037.852,00	100,00

Sumber data: BPKKD Kab. Sintang

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Proporsi retribusi pelayanan kesehatan terhadap retribusi daerah selama tahun 2001 sampai tahun 2001 memberikan proporsi paling besar dibandingkan retribusi-retribusi yang lain. Pada tahun 2001 proporsi yang diberikan terhadap retribusi daerah sebesar 44,81%, pada tahun 2002 sebesar 36,18%, pada tahun 2003 sebesar 42,32%, pada tahun 2004 sebesar 79,56%.

Dari tahun 2001 sampai tahun 2002 proporsi retribusi ini mengalami penurunan sebesar 8,63%, sedangkan dari tahun 2002 sampai tahun 2004 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini menunjukkan kenaikan jumlah pasien atau pemakai layanan kesehatan yang semakin meningkat dari tahun 2002 sampai tahun 2004.

Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 79,56%, hal ini dikarenakan jumlah pasien pada tahun tersebut cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana jumlah penerimaan retribusi melebihi target yang diperkirakan. Sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar 36,18%. Hal ini disebabkan oleh kualitas kesehatan penduduk yang semakin meningkat sehingga jumlah pasien semakin menurun. Proporsi retribusi pelayanan kesehatan terhadap retribusi daerah sangat besar karena memberikan proporsi paling besar terhadap keseluruhan retribusi daerah.

2. Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Proporsi retribusi ini menurun dari tahun 2001 sampai tahun 2004, dengan proporsi 12,65% (tahun 2001); 7,13% (tahun 2002); 5,6% (tahun 2003); 1,82% (tahun 2004). Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam pemungutan retribusi Persampahan / Kebersihan.

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Dari tahun 2001 sampai tahun 2002 penerimaan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu dari 6,92% menjadi 15,07%, kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk yang menetap di kabupaten sintang semakin meningkat, kemudian mengalami penurunan di tahun 2003 yaitu menjadi 9,09%. tahun 2004 juga mengalami penurunan menjadi 3,16%.

4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Untuk retribusi ini dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami penurunan pemasukan yaitu tahun 2001 sebesar 0,69% menurun pada tahun 2002 menjadi 0,58%, menurun lagi pada tahun 2003 menjadi 0,31%, sedangkan proporsi terendah pada tahun 2004 yaitu sebesar 0,12%. Proporsi tertinggi dan terendah masih dikatakan sangat rendah karena berada dibawah 1%. Terjadinya penurunan dari tahun 2001 sampai tahun 2004 menunjukkan bahwa Pemerintah mengalami hambatan dalam melakukan penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Dilihat dari menurunnya pemasukan dari tahun 2001 sampai tahun 2004 dapat dikatakan bahwa jenis retribusi ini kurang berpotensi bagi retribusi daerah.

5. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar juga mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2001 sebesar 10,13%, menjadi 4,97% di tahun 2002 kemudian menurun menjadi 2,45% di tahun 2003 dan terus menurun menjadi 0,62% di tahun 2004. Proporsi retribusi ini terhadap retribusi daerah sangat rendah sehingga relatif tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan retribusi daerah. Jika dilihat dari menurunnya pemasukan pada retribusi ini maka dapat dikatakan bahwa jenis retribusi ini kurang berpotensi bagi retribusi daerah.

6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi ini dari tahun 2001 sampai tahun 2004 hanya terjadi pemasukan sebesar 0,27% dari proporsi keseluruhan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002. Untuk tahun 2001, 2002 dan 2004 tidak terdapat pemasukan di retribusi ini. Hal ini menunjukkan bahwa jenis retribusi ini kurang berpotensi bagi retribusi daerah.

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Jenis retribusi dapat dikatakan kurang berpotensi untuk retribusi daerah karena dari tahun 2001 sampai dengan 2004, hanya terjadi pemasukan di tahun 2004 sebesar 0,67%. Namun disamping itu juga menunjukkan peningkatan karena dari tahun 2001 sampai tahun 2003 tidak ada pemasukan tetapi di tahun 2004 terjadi pemasukan. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2004 jumlah kendaraan bermotor yang diuji mengalami peningkatan sehingga dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan retribusi daerah.

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dari tahun 2001 sampai tahun 2002 penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah mengalami peningkatan yaitu dari 10,12% menjadi 11,55%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2003 yaitu sebesar 11,41%. Tahun 2004 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari 11,41% menjadi 2,79% pada tahun 2004. Terjadinya penurunan drastis di tahun 2004 menunjukkan bahwa penarikan retribusi kekayaan daerah mengalami hambatan.

9. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Dari tahun 2001 sampai tahun 2002 penerimaan retribusi pasar grosir dan atau pertokoan mengalami peningkatan yaitu dari 0% menjadi 3,1%, kemudian mengalami peningkatan lagi di tahun 2003 yaitu menjadi 3,93%. Tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 1,46%.

10. Retribusi Jasa Usaha Terminal

Proporsi retribusi ini menurun dari tahun 2001 sampai tahun 2004, dengan proporsi 5,37% pada tahun 2001, 3,16% pada tahun 2002, 3,01% pada tahun 2003, ditahun 2004 sebesar 0,67%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penggunaan kendaraan umum tidak cukup besar di Kabupaten Sintang. Selain itu perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada proses penarikan retribusi ini.

11. Retribusi Tempat Penginapan / Pasanggrahan / Villa

Pemasukan pada jenis retribusi ini untuk tahun 2001 sampai tahun 2004 hanya terjadi pada tahun 2001 dan tahun 2002, sedangkan tahun 2003 dan tahun 2004 tidak terjadi penerimaan. Naik dan turunnya pengunjung di tempat

penginapan akan mempengaruhi secara langsung penerimaan retribusi. Penerimaan dari retribusi ini juga berkaitan langsung dengan penerimaan dari retribusi tempat parkir yang berada di tempat penginapan, pasanggrahan ataupun villa.

12. Retribusi Rumah Potong Hewan

Untuk jenis retribusi ini hanya terjadi penerimaan sebesar 0,07% pada tahun 2002, dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk tahun 2001, 2003 dan 2004 tidak terjadi penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian aktif rumah potong hewan hanya terjadi pada tahun 2002. Selain itu juga mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang mengalami hambatan dalam melakukan penarikan jenis retribusi ini.

13. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Dari tahun 2001 sampai tahun 2002 mengalami kenaikan proporsi retribusi ijin mendirikan bangunan, yaitu 7% menjadi 7,24%. Namun pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 7,22%, kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2004 menjadi 2,59%. Turun naiknya proporsi retribusi menunjukkan bahwa pada tahun yang naik jumlah bangunan yang dibangun meningkat, demikian sebaliknya jika proporsi turun maka jumlah bangunan yang dibangun menurun.

14. Retribusi Ijin Gangguan

Proporsi retribusi ini dari tahun 2002 sampai tahun 2004 mengalami penurunan yaitu sebesar 6,41% pada tahun 2002, 4,08% pada tahun 2003, 1,18% pada tahun 2004. Sedangkan untuk tahun 2000 tidak terdapat pemasukan pada

retribusi ini. Hal ini disebabkan adanya pendirian perusahaan besar yaitu kayu dan peternakan. Proporsi terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 1,18%.

15. Retribusi Ijin Trayek

Pada tahun 2001 kontribusi retribusi ini sebesar 1,25% kemudian meningkat menjadi 1,34% pada tahun 2002. Pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 0,75% kemudian terus menurun pada tahun 2004 menjadi 0,2%. Menurunnya tingkat kontribusi pada jenis retribusi ini disebabkan karena tidak bertambahnya pengusaha di bidang transportasi darat, yang memerlukan ijin trayek.

16. Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan

Pada tahun 2001 sampai tahun 2004, untuk jenis retribusi ini hanya terjadi pemasukan di tahun 2003 sebesar 6,1%. Hal ini disebabkan karena pada tahun yang tidak terdapat pemasukan, pemerintah mengalami hambatan dalam pemungutan retribusi.

17. Retribusi Penyeberangan di Atas Air

Dari tahun 2001 sampai tahun 2004, untuk jenis retribusi ini hanya terjadi pemasukan di tahun 2003 sebesar 0,28%. Hal ini terjadi karena pengguna penyeberangan di atas air semakin berkurang disebabkan masyarakat lebih mengutamakan perjalanan darat yaitu menggunakan motor dan angkutan umum selain itu pemerintah juga mengalami hambatan dalam melakukan pemungutan retribusinya.

18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil

Jenis retribusi ini dari tahun 2001 sampai tahun 2004, pemasukan hanya terjadi di tahun 2003 sebesar 0,45% dan meningkat tahun 2004 sebesar 1,83% karena adanya peningkatan pelayanan penggantian biaya cetak akte catatan sipil di kecamatan dan jumlah penduduk yang menetap dikabupaten sintang semakin meningkat.

19. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004, pemasukan hanya terjadi di tahun 2003 sebesar 0,01% dan meningkat tahun 2004 sebesar 2,79% ini harus bisa ditingkatkan lagi supaya kontribusi ini dapat memberikan proporsi yang lebih tinggi lagi dan dapat meningkatkan penerimaan daerah.

20. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal

Jenis retribusi ini dari tahun 2001 sampai tahun 2004, pemasukan hanya terjadi di tahun 2003 sebesar 0,91% dan meningkat tahun 2004 sebesar 20,2%.

21. Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Untuk jenis retribusi ini pemasukan dari tahun 2001 sampai 2004 hanya terjadi pada tahun 2004 sebesar 0,09% proporsi yang masih rendah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang harus lebih meningkatkan dan mengali potensi dari retribusi ini sehingga dapat meningkatkan penerimaannya.

22. Retribusi Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum Koperasi

Proporsi retribusi ini sama seperti jenis retribusi ijin usaha jasa konstruksi. Untuk jenis retribusi ini pemasukan dari tahun 2001 sampai 2004 hanya terjadi pada tahun 2004 sebesar 0,26%.

23. Retribusi Ijin Bengkel Umum dan Modifikasi Kendaraan Bermotor

Proporsi retribusi ini sama seperti jenis retribusi ijin usaha jasa konstruksi, untuk jenis retribusi ini pemasukan dari tahun 2001 sampai 2004 hanya terjadi pada tahun 2004 sebesar 0,01%. Hal ini terjadi karena pemerintah mengalami hambatan dalam melakukan pemungutan retribusi.

B. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sintang

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah berupaya untuk meningkatkan kegiatan pemungutan pajak khususnya retribusi daerah dengan tetap mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama 4 tahun terhitung dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi penerimaan pajak daerah yang ditargetkan, ini terbukti dimana setiap tahunnya terjadi penambahan jenis retribusi yang disebabkan karena adanya ekstensifikasi retribusi.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 5.5. di bawah ini menjelaskan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 5.5
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Sintang
Pada tahun 2001 - tahun 2004

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi (%)
2001	911.717.380,00	30.154.337.292,71	3,02
2002	1.512.323.859,00	17.904.842.516,29	8,45
2003	1.683.287.107,50	9.119.526.475,68	18,46
2004	5.653.037.852,00	17.060.579.489,79	33,14
Rata-rata			15,77

Sumber : BPKKD Kab. Sintang

Dari tabel 5.5 dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sampai dengan 2004 berkisar antara 3,02%-33,14%. Pada tahun 2001 retribusi daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 3,02% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 sebesar 8,45% yaitu dari 3,02% menjadi 8,45%.

Meskipun pada tahun 2003 retribusi mengalami peningkatan dalam realisasinya namun kontribusi yang diberikan tetap mengalami peningkatan sedikit demi sedikit ini terjadi pada tahun 2004, pada tahun 2004 sebesar 33,14% yaitu dari 18,46% menjadi 33,14%.

Rata-rata kontribusi retribusi daerah yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 adalah sebesar 15,77%. Sedangkan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi 33,14% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2001 dengan kontribusi 3,02%. Dengan demikian retribusi daerah

yang dipungut Pemerintah daerah Kabupaten Sintang mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

1. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi atau target pajak dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajaknya.

Efektivitas (hasil guna) adalah hubungan antara hasil pungutan dan potensi hasil retribusi.

Menurut Mardiasmo (2002:129), efektivitas tidaknya suatu pusat pertanggungjawaban dapat dinilai dengan mengasumsikan bahwa :

- a. Apabila realisasi penerimaan retribusi daerah semakin besar terhadap target retribusi daerah maka dapat dikatakan pemungutan retribusi semakin efektif.
- b. Apabila realisasi penerimaan retribusi daerah semakin kecil terhadap target retribusi daerah maka dapat dikatakan pemungutan retribusi kurang efektif.

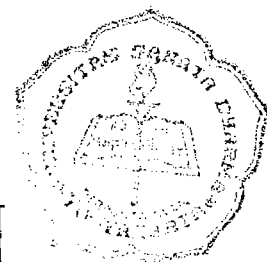
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100%. Semakin tinggi rasio aktifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Untuk menentukan efektivitas digunakan rumus :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ penerimaan\ retribusi\ daerah}{Target\ retribusi\ daerah} \times 100\ %$$

Secara jelas, efektivitas retribusi daerah dapat ditunjukkan dalam tabel 5.6.

Tabel 5.6
Efektivitas Retribusi Daerah
Kabupaten Sintang
Pada tahun 2001 – tahun 2004



Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Target Retribusi Daerah	Efektivitas (%)
2001	911.717.475,00	1.888.938.140,00	48,27
2002	1.517.323.859,00	2.091.631.710,00	72,54
2003	1.683.287.107,00	3.697.724.728,00	45,52
2004	5.495.411.106,00	3.802.611.103,00	144,52
Rata-rata			77,71

Sumber : BPKKD Kab. Sintang

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa :

- a). Pada tahun 2001 tingkat efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Sintang kurang dari 100% yaitu 48,27% berarti bahwa pada tahun 2001 tersebut penerimaan retribusi tidak efektif. Realisasi penerimaan retribusi tidak melebihi target yang direncanakan ini dikarenakan adanya penurunan penerimaan dari beberapa jenis retribusi.
- b). Pada tahun 2002 tingkat efektivitas retribusi mengalami peningkatan sebesar 24,27% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,54% walaupun mengalami peningkatan namun tidak berpengaruh karena masih dibawah standar yaitu kurang dari 100%.
- c). Pada tahun 2003 tingkat efektivitas kurang dari 100% yaitu 45,52% hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi sangat kecil sekali ini dikarenakan bahwa pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, namun pada tahun 2004 tingkat efektivitas melebihi 100% yaitu 144,52%, berarti pada tahun 2004 tersebut penerimaan retribusi daerah sudah

efektif ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya dibidang keuangan dengan baik.

- d). Rata-rata tingkat efektivitas pada 4 tahun belakangan ini yaitu sebesar 77,71% dari angka tersebut, biaya pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Sintang tidak efektif karena kurang dari 100%.

2. Analisis Efisiensi Biaya Pemungutan Retribusi Daerah

Analisis ini merupakan perbandingan keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan oleh suatu unit input yang digunakan.

Efisiensi (daya guna) digunakan untuk mengukur bagian dari hasil retribusi daerah yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi daerah.

Efisiensi tidaknya pemungutan retribusi daerah digunakan tolok ukur efisiensi dengan membandingkan angka ratio yang diperoleh dengan standar ratio pemungutan retribusi tersebut (Anthony, dkk, 1993:202).

Dari hasil pengukuran ratio tersebut tingkat efisiensi dapat diartikan sebagai berikut :

1. Apabila ratio yang diperoleh masih dibawah standar ratio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa biaya pemungutan retribusi daerah efisien.
2. Apabila ratio yang diperoleh melampaui standar ratio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan retribusi daerah kurang efisien.

Untuk menentukan efisiensi biaya pemungutan retribusi daerah digunakan rumus :

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ pemungutan\ retribusi\ daerah}{realisasi\ retribusi\ daerah} \times 100\ %$$

Untuk lebih jelas, efisiensi biaya pemungutan retribusi daerah dapat ditunjukkan dalam tabel :

Tabel 5.7
Efisiensi Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
Kabupaten Sintang
Pada tahun 2001 - tahun 2004

Tahun	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Tingkat Efisiensi (%)
2001	977.220.665,00	911.717.475,00	107,18
2002	579.302.851,00	1.517.323.859,00	38,18
2003	2.014.437.620,50	1.683.287.107,00	119,67
2004	68.141.101,00	5.495.411.106,00	1,23
Rata-rata			66,57

Sumber : BPKKD Kab. Sintang

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa :

- a). Pada tahun 2001 tingkat efisiensi sebesar 107,18% hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Sintang dalam melakukan pemungutan retribusi sudah efisien karena melebihi dari standar yang ditetapkan yaitu 5%.
- b). Pada tahun 2002 tingkat efisiensi mengalami penurunan sebesar 69,00% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 38,18% yang berarti bahwa pemungutan retribusi pada tahun 2002 efisien.
- c). Pada tahun 2003 tingkat efisien mengalami peningkatan sebesar 81,49% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 119,67% tingkat efisien mengalami penurunan sampai 118,44%. Biaya pemungutan retribusi dari tahun ketahun mengalami peningkatan namun terkadang mengalami penurunan.

d). Rata-rata tingkat efisiensi pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 sebesar 66,57%. Dari angka tersebut, biaya pemungutan retribusi daerah diKabupaten Sintang sudah efisien karena masih bisa melebihi biaya pemungutan dengan rata-rata 66,57% dari realisasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama empat tahun terhitung dari tahun 2001 sampai dengan 2004 perkembangan masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah mengalami kenaikan yang signifikan, dimana setiap tahunnya terjadi penambahan jenis retribusi.
2. Dari perhitungan yang telah dilakukan, tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berkisar antara 48,27% - 45,52%. Berdasarkan analisis efektivitas, tingkat efektivitas penerimaan retribusi di Kabupaten Sintang cenderung mengalami penurunan pada tahun 2003 kecuali pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang drastis yaitu 144,52%. Dengan demikian penerimaan retribusi daerah di Kabupten Sintang tidak efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai kurang dari 100% yaitu sebesar 77,71%. Walaupun tingkat efektivitas meningkat pada tiap tahunnya dengan rata-rata untuk perubahan yang kecil.
3. Tingkat efisiensi biaya pemungutan retribusi daerah berkisar antara 107,18% - 1,23% dengan rata-rata 66,57%. Dengan rata-rata tingkat efisiensi tersebut daya guna retribusi daerah cukup besar karena di atas standar ratio biaya pemungutan untuk Kabupaten Sintang sebesar 5%.

4. Kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 berkisar antara 3,02%-33,34%, dengan rata-rata retribusi sebesar 15,77%. Retribusi daerah memberikan kontribusi yang masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan jumlah jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
2. Penelitian ini hanya dapat diterapkan di Kabupaten Sintang tetapi belum tentu dapat diterapkan di daerah lain karena merupakan studi kasus.
3. Dalam penelitian ini data pada tahun 2004 diberikan kepada penulis berupa laporan target setelah perubahan dan realisasi penerimaan pendapatan daerah pada bulan desember, karena pada tahun 2004 belum disahkan.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah daerah dalam rangka memaksimalkan penerimaan melalui retribusi daerah. Saran yang di berikan kepada penulis antara lain :

1. Dalam upaya meningkatkan proporsi dari penerimaan retribusi daerah, pemerintah hendaknya lebih digali potensinya sehingga dapat memberikan proporsi yang lebih besar terhadap retribusi daerah.

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sudah sangat besar hendaknya terus dipertahankan supaya penerimaan daerah dapat lebih efektif.
3. Efektivitas penerimaan retribusi daerah yang masih kecil hendaknya tetap lebih ditingkatkan dengan cara memaksimalkan pemungutan pada jenis-jenis retribusi yang masih rendah penerimaannya.
4. Mengingat wajib pajak dan aparat pajak sangat penting peranannya dalam upaya meningkatkan pajak maka pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya senantiasa meningkatkan upaya pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan secara luas dan merata baik secara langsung maupun melalui media seperti televisi, radio, dan surat

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert, N, John, Dearden dan Norton, M, Bedford. (1993). *Sistem Pengendalian Manajemen I*. Edisi keenam. (Agus Maulana, penerjemah). Jakarta: Binarupa Akasara.
- Budiyuwono, Nugroho. (1995). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Bais, Yasinta Dolvina. (2003) *Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah*. Skripsi tidak dipublikasikan Unuversitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Devas, Nick. (1987). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Kaho, Josef Riwu. (1997), *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang (2003). *Sintang Dalam Angka (2003)*. Sintang: BPS.
- Munawir. (1992). *Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba empat.
- Republik Indonesia. (2000). *Perubahan Atas Undang-Undang No.18 Tahun (1997) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 34 Tahun (2000)*. Jakarta: Departemen Dalam Negri Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1999). *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang No.25 Tahun (1999)*. Jakarta: Departemen Dalam Negri Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No.22 Tahun (1999). tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: CV. Tamita Utama.
- Suparmoko. (1984). *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPi E.
- Suparmoko. (1984). *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPF E.
- Samudra, Azhari. (1995). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, H.A.W, (2001). *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sintang

1. Bagaimana pembentukan Pemerintah Kabupaten Sintang ?
2. Fasilitas apa saja yang terdapat di Kabupaten Sintang?
3. Geografi
 - a. Dimanakah letak Kabupaten Sintang?
 - b. Bagaimanakah batas wilayahnya?
 - c. Bagaimanakah pembagian wilayahnya?
 - d. Berapakah luas wilayahnya?
4. Penduduk
 - a. Berapakah jumlah penduduk tahun 2001 - 2004?
 - b. Bagaimanakah komposisi penduduknya?
 - c. Berapakah kepadatan penduduknya?
 - d. Berapakah angkatan kerja atau pencari kerja pada tahun 2001-2004?
5. Kekayaan alam
 - a. Bagaimana struktur dan jenis tanah yang ada?
 - b. Bagaimanakah pemanfaatan tanah yang ada?
 - c. Apa saja jenis flora dan faunanya?
6. Ekonomi
 - a. Bagaimanakah sektor pertanian di Kabupaten Sintang?
 - b. Industri apa saja yang ada?
 - c. Bagaimanakah sarana perhubungan yang ada, baik transportasi darat, laut maupun udara?

d. Bagaimanakah pengembangan sektor pariwisatanya?

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Ada berapa sektor pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Sintang?
2. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan pendapatan asli daerah tersebut?
3. Berapakah realisasi pendapatan asli daerah untuk masing-masing tahun?
4. Antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan apakah mengalami peningkatan atau penurunan?
5. Hal-hal apa saja yang menjadi penyebab kenaikan atau penurunan pendapatan asli daerah tersebut?
6. Upaya apa yang telah dilakukan Kabupaten Sintang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah?
7. Berapa besar peranan pendapatan asli daerah terhadap penerimaan Kabupaten Sintang?

C. Retribusi Daerah

1. Ada berapa sektor retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sintang?
2. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan tersebut?
3. Berapa anggaran retribusi daerah yang telah ditetapkan untuk anggaran 2001-2004?
4. Bagaimana realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2001-2004?
5. Apa saja yang menyebabkan kenaikan dan penurunan penerimaan retribusi daerah tersebut?

6. Seberapa besar sumbangan masing-masing retribusi terhadap penerimaan retribusi daerah?
7. Seberapa besar sumbangan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah?
8. Apakah pemungutan retribusi daerah telah berjalan dengan efektif dan efisien?



BUPATI SINTANG

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR 284 TAHUN 2002

TENTANG

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN KEGIATAN /
PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2001

BAB I : PENDAPATAN

LAMPIRAN : C/1.
Halaman : 1

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	1.868.920.445,88	1.790.528.445,88	(78.392.000,00)	
1.1.1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	1.868.920.445,88	1.790.528.445,88	(78.392.000,00)	
1.1.1.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	1.868.920.445,88	1.790.528.445,88	(78.392.000,00)	Target Penerimaan Rp. 1.868.920.445,88 Realisasi Penerimaan Rp. 1.790.528.445,88 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. <u>78.392.000,00</u> Selisih sebesar Rp. 392.709.563,00 WUDP yang masih berada pada Bendaharawan.
1.2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	17.800.363.654,01	10.156.337.292,71	12.355.973.638,70	
1.2.1.	Pos Pajak Daerah	637.222.653,00	855.303.837,21	218.081.184,21	
1.2.1.001	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.002	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.003	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.004	Pajak Hotel dan Restoran	96.000.000,00	139.768.909,00	43.768.909,00	Target Penerimaan Rp. 96.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 139.768.909,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (<u>43.768.909,00</u>)

I : PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.005	Pajak Hiburan	40.000.000,00	17.367.635,00	(22.632.365,00	Target Penerimaan Rp. 40.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 17.367.635,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 22.632.365,00
1.006	Pajak Reklame	60.000.000,00	108.060.007,00	48.060.007,00	Target Penerimaan Rp. 60.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 108.060.007,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 48.060.007,00
1.007	Pajak Penerangan Jalan	181.222.653,00	181.223.035,00	382,00	Target Penerimaan Rp. 181.222.653,00 Realisasi Penerimaan Rp. 181.223.035,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 382,00
1.008	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	260.000.000,00	408.436.146,21	148.436.146,21	Target Penerimaan Rp. 260.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 408.436.146,21 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 148.436.146,21
1.009	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	454.105,00	454.105,00	
	Pos Retribusi Daerah	1.888.938.140,00	911.717.475,00	(977.220.665,00	

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.2.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.336.401.140,00	408.530.580,00	(927.870.560,00	Target Penerimaan Rp. 1.336.401.140,00 Realisasi Penerimaan Rp. 408.530.580,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (927.870.560,00
2.2.002	Retribusi Pelayanan Perkampuhan/Kebersihan	72.500.000,00	115.334.800,00	42.834.800,00	Target Penerimaan Rp. 72.500.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 115.334.800,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 42.834.800,00
2.2.003	Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	52.500.000,00	63.096.500,00	10.596.500,00	Target Penerimaan Rp. 52.500.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 63.096.500,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 10.596.500,00
2.2.004	Retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	
2.2.005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	9.900.000,00	6.323.000,00	(3.577.000,00	Target Penerimaan Rp. 9.900.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 6.323.000,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (3.577.000,00
2.2.006	Retribusi Pasar	101.500.000,00	92.370.400,00	(9.129.600,00	Target Penerimaan Rp. 101.500.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 92.370.400,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (9.129.600,00

BAB I : PENDAPATAN

LAMPIRAN : C/1.

Halaman : 4

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.2.2.007	Retribusi air bersih	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.008	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.009	Retribusi Pemeriksaan Alat Pesadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.010	Retribusi Penggantian biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.011	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.012	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	136.250.000,00	92.256.000,00	(44.994.000,00)	Target Penerimaan Rp. 136.250.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 92.256.000,00 <hr/> Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 43.994.000,00
1.2.2.013	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.014	Retribusi Terminal	55.000.000,00	48.940.100,00	(6.059.900,00)	Target Penerimaan Rp. 55.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 48.940.100,00 <hr/> Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (6.059.900,00)
1.2.2.015	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.016	Retribusi Tempat Penitipan Anak	0,00	0,00	0,00	

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.2.2.017	Retribusi tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	9.500.000,00	9.713.500,00	213.500,00	Target Penerimaan Rp. 9.500.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 9.713.500,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 213.500,00
1.2.2.018	Retribusi Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.019	Retribusi Rusah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.020	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.021	Cadangan	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.022	Retribusi Penyeberangan diatas air	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.023	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.024	Retribusi Penjualan Produk Usahw Daerah	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.025	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.026	Retribusi Izin mendirikan Bangunan	62.300.000,00	63.780.000,00	1.480.000,00	Target Penerimaan Rp. 62.300.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 63.780.000,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 1.480.000,00
1.2.2.027	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Keras	0,00	0,00	0,00	

BAB I : PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.2.2.028	Retribusi Izin Gangguan	47.087.000,00	0,00	47.087.000,00	Target Penerimaan Rp. 47.087.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 0,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 47.087.000,00
1.2.2.029	Retribusi Izin Trayek	6.000.000,00	11.372.500,00	5.372.500,00	Target Penerimaan Rp. 6.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 11.372.500,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 5.372.500,00
1.2.2.030	Cadangan	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.001	Bank Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.002	Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.003	Cadangan	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.	Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.274.202.861,01	28.389.309.980,50	13.115.107.119,49	
1.2.4.001	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	



KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR 158 TAHUN 2003

TENTANG

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2002

BAB I : PENDAPATAN

LAMPIRAN : C/1.
Halaman : 1

KODE ANGGARAN	URAIAN PEKERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	12.377.382.298,21	12.204.069.947,21	(173.312.351,00)	Perda No 16 Th 2002 tgl.15 juli 2002 Tentang sisa Perhitungan APBD Kab.Stg TA.2001 Sisa Perhitungan Anggaran sebesar Rp.12.377.382.298,21 terdiri dari
1.1.1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	12.377.382.298,21	12.204.069.947,21	(173.312.351,00)	-Saldo B.IX Rp.11.692.354.126,21
1.1.1.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	12.377.382.298,21	12.204.069.947,21	(173.312.351,00)	-Setoran Sisa UUDP Rp. 251.649.998,00 -Sisa UUDP pada Bendarawan Rp. 260.065.823,00
					Jumlah Rp.12.204.069.947,21
					- Penyampaian SPJ Rp. 173.312.351,00
					Jumlah Rp.12.377.382.298,21
1.2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	12.035.543.162,29	17.904.842.516,29	5.869.299.354,00	
1.2.1.	Pos Pajak Daerah	890.165.000,00	874.197.124,00	(15.967.876,00)	
1.2.1.001	Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.002	Pajak Kendaraan di atas Air	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.003	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.006	Pajak Hotel	61.400.000,00	19.034.070,00	(42.365.930,00)	Target Penerimaan Rp. 61.400.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 19.034.070,00
					Penerimaan lebih (Kurang) ... Rp. (42.365.930,00)

: PENDAPATAN

LAMPIRAN : C/1.

Halaman : 2

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.007	Pajak Restoran	67.500.000,00	169.308.935,00	101.808.935,00	Target Penerimaan Rp. 67.500.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 169.308.935,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 101.808.935,00
1.008	Pajak Hiburan	25.000.000,00	15.470.727,00	(9.529.273,00	Target Penerimaan Rp. 25.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 15.470.727,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (9.529.273,00
1.009	Pajak Reklame	60.255.000,00	66.678.427,00	6.413.427,00	Target Penerimaan Rp. 60.255.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 66.678.427,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 6.413.427,00
1.010	Pajak Penerangan Jalan	196.000.000,00	281.535.055,00	85.535.055,00	Target Penerimaan Rp. 196.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 281.535.055,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 85.535.055,00
1.011	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	440.000.000,00	282.169.910,00	(157.830.090,00	Target Penerimaan Rp. 440.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 282.169.910,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (157.830.090,00
1.012	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	0,00	0,00	0,00	
1.013	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	

BAB I : PENDAPATAN

LAMPIRAN : C/1

Halaman : 3

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.2.1.014	Cadangan	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	Pos Retribusi Daerah	2.091.531.710,00	1.512.329.859,00	(579.202.851,00	
1.2.2.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.292.360.810,00	547.165.470,00	(745.195.340,00	Target Penerimaan Rp. 1.292.360.810,00 Realisasi Penerimaan Rp. 547.165.470,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (745.195.340,00
1.2.2.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	107.781.250,00	7.781.250,00	Target Penerimaan Rp. 100.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 107.781.250,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 7.781.250,00
1.2.2.003	Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	125.000.000,00	227.904.000,00	102.904.000,00	Target Penerimaan Rp. 125.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 227.904.000,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 102.904.000,00
1.2.2.004	Retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.005	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	9.500.000,00	8.612.000,00	(888.000,00	Target Penerimaan Rp. 9.500.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 8.612.000,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (888.000,00

AB I : PENDAPATAN

LAMPIRAN : C/1.
Halaman : 4

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.2.2.006	Retribusi Pelayanan Pagar	45.000.000,00	75.153.600,00	30.153.600,00	Target Penerimaan Rp. 45.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 75.153.600,00 <hr/> Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 30.153.600,00
1.2.2.007	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	25.020.900,00	0,00	(25.020.900,00	Target Penerimaan Rp. 25.020.900,00 Realisasi Penerimaan Rp. 0,00 <hr/> Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (25.020.900,00
1.2.2.008	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.009	Retribusi Penggantian biaya Cetak Peta	1.875.000,00	4.080.000,00	2.205.000,00	Target Penerimaan Rp. 1.875.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 4.080.000,00 <hr/> Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 2.205.000,00
1.2.2.010	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.011	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	202.750.000,00	174.681.950,00	(28.068.050,00	Target Penerimaan Rp. 202.750.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 174.681.950,00 <hr/> Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (28.068.050,00

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
..2.2.012	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	70.000.000,00	46.812.300,00	(23.187.700,00	Target Penerimaan Rp. 70.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 46.812.300,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (23.187.700,00
..2.2.013	Retribusi Tempat Pelelergan	0,00	0,00	0,00	
..2.2.014	Retribusi Terminal	59.624.000,00	47.824.500,00	(11.799.500,00	Target Penerimaan Rp. 59.624.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 47.824.500,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (11.799.500,00
1.2.2.015	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.016	Retribusi tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	24.500.000,00	44.332.055,00	19.832.055,00	Target Penerimaan Rp. 24.500.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 44.332.055,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 19.832.055,00
..2.2.017	Retribusi Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	
..2.2.018	Retribusi Rumah Potong hewan	1.000.000,00	1.050.000,00	50.000,00	Target Penerimaan Rp. 1.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 1.050.000,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. 50.000,00
..2.2.019	Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	0,00	0,00	0,00	
..2.2.020	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	

KODE ANGGARAN	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.2.2.021	Retribusi Pembeberangan di atas air	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.022	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.023	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.024	Retribusi Izin mendirikan Bangunan	95.000.000,00	109.549.149,00	14.549.149,00	Target Penerimaan Rp. 95.000.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 109.549.149,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. <u>14.549.149,00</u>
1.2.2.025	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.026	Retribusi Izin Gangguan	22.400.000,00	96.694.185,00	74.494.185,00	Target Penerimaan Rp. 22.400.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 96.694.185,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. <u>74.494.185,00</u>
1.2.2.027	Retribusi Izin Trayek	15.673.000,00	20.268.400,00	4.615.400,00	Target Penerimaan Rp. 15.673.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 20.268.400,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. <u>4.615.400,00</u>
2.2.028	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	928.000,00	0,00	(928.000,00	Target Penerimaan Rp. 928.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 0,00 Penerimaan Lebih (Kurang) ... Rp. (<u>928.000,00</u>

BAB I : PENDAPATAN

LAMPIRAN : C/1.
Halaman : 7

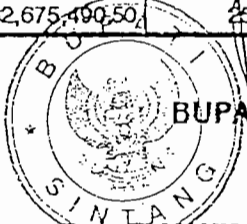
KODE ANGGARAN	UPAIAN PENERIMAAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.2.2.029	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.030	Cadangan	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Pos Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.001	Bank Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.002	Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.003	Cadangan	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.	Pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.053.746.452,29	15.518.316.533,27	6.464.570.081,00	
1.2.4.001	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.002	Jasa Giro	979.100.000,00	1.301.996.932,00	322.896.932,00	Target Penerimaan Rp. 979.100.000,00 Realisasi Penerimaan Rp. 1.301.996.932,00 Penerimaan lebih (kurang) ... Rp. 322.896.932,00
1.2.4.003	Sumbangan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.004	Penerimaan Ganti rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	0,00	0,00	0,00	



RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

LAMPIRAN : C / I

KODE ANGGARAN	URAIAN BAGIAN DAN POS	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	BERLEBIH / BERKURANG
1.1.	<u>BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU</u>	<u>12,377,382,298.21</u>	<u>12,204,069,947.21</u>	<u>(173,312,351.00)</u>
1.1.1.	Pos Sisa Leblh Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	12,377,382,298.21	12,204,069,947.21	(173,312,351.00)
1.2.	<u>BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI</u>	<u>12,035,543,182.29</u>	<u>17,904,842,518.29</u>	<u>5,869,299,354.00</u>
1.2.1.	Pos Pajak Daerah	690,165,000.00	874,197,124.00	(15,967,876.00)
1.2.2.	Pos Retribusi Daerah	2,091,631,710.00	1,512,328,859.00	(579,302,851.00)
1.2.3.	Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	-	-	-
1.2.4.	Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9,053,746,452.29	15,518,316,533.29	6,464,570,081.00
1.3.	<u>BAGIAN DANA PERIMBANGAN</u>	<u>219,735,670,030.00</u>	<u>215,769,802,102.00</u>	<u>(3,965,867,928.00)</u>
1.3.1.	Pos Bagi Hasil Pajak	18,360,512,000.00	13,754,245,695.00	(4,606,266,305.00)
1.3.2.	Pos Hasil bukan Pajak Sumber Daya Alam	2,670,425,530.00	4,560,823,907.00	1,890,398,377.00
1.3.3.	Pos Dana Alokasi Umum	194,540,000,000.00	194,540,000,000.00	0.00
1.3.4.	Pos Dana Alokasi Khusus	2,914,732,500.00	2,914,732,500.00	0.00
1.3.5.	Pos Dana Darurat	1,250,000,000.00	-	(1,250,000,000.00)
1.4.	<u>BAGIAN PINJAMAN DAERAH</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1.4.1.	Pos Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-
1.4.2.	Pos Pinjaman Luar Negeri	-	-	-
1.5.	<u>BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH</u>	<u>5,234,080,000.00</u>	<u>10,179,410,110.75</u>	<u>4,945,330,110.75</u>
1.5.1.	Penerimaan dari Pusat	-	2,939,291,203.00	2,939,291,203.00
1.5.2.	Penerimaan dari Propinsi	1,124,080,000.00	2,430,112,657.75	1,308,032,657.75
1.5.3.	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	-	-	-
1.5.4.	Penerimaan lain-lain	4,110,000,000.00	4,810,008,250.00	700,008,250.00
	JUMLAH PENERIMAAN	249,382,675,490.50	258,058,124,676.25	8,675,449,185.75



BUPATI SINTANG,

 DR. ELAKIM SIMONDIALI MM



KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR 149 TAHUN 2004

TENTANG

**PENJABARAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG**

Tahun Anggaran 2003

KODE REKENING						URAIAN	JML ANGGARAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	01	03	01	1		BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN				Perda No 2 Tahun 2003 Tanggal 18 Juni 2003 Tentang Sisa Perhitungan APBD Kab. Sintang TA. 2002 Sisa Perhitungan Anggaran sebesar Rp. 11.934.335.770,56 terdiri dari: - Sisa B. III : 10.646.884.014,56 - Sisa UUDF : 1.020.880.933,00 - Sisa UUDF Pd Pemegang Kas : 266.570.823,00 Jumlah : 11.934.335.770,56 - Penghasilan BP : Jumlah : 11.934.335.770,56
ANGGARAN TAHUN YANG LALU										
3	01	03	01	1	01	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	11.934.335.770,56	1.139.835.055,50	(10.803.500.715,06)	
3	01	03	01	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	11.934.335.770,56	1.139.835.055,50	(10.803.500.715,06)	
1			1			BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.497.528.800,00	9.119.526.475,68	2.711.997.675,68	
1			1	1		PAJAK DAERAH	1.465.014.342,00	1.069.125.509,50	(395.888.832,50)	
1			1	1	01	Pajak Hotel	483.634.800,00	47.135.825,00	(436.498.975,00)	Target Penerimaan : 483.634.800,00 Realisasi Penerimaan : 47.135.825,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (436.498.975,00)
1	01	05	1	1	02	Pajak Restoran/Rumah Makan	175.999.500,00	245.837.321,00	69.837.821,00	Target Penerimaan : 175.999.500,00 Realisasi Penerimaan : 245.837.321,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : 69.837.821,00
1	01	05	1	1	03	Pajak Hiburan	14.517.000,00	15.640.500,00	1.123.500,00	Target Penerimaan : 14.517.000,00 Realisasi Penerimaan : 15.640.500,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : 1.123.500,00
1	01	05	1	1	04	Pajak Reklame	96.062.642,00	96.988.427,50	925.785,50	Target Penerimaan : 96.062.642,00 Realisasi Penerimaan : 96.988.427,50 Penerimaan Lebih (Kurang) : 925.785,50

KODE REKENING						URAIAN	JML ANGGARAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6					
1	01	05	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan	244.800.000,00	424.552.340,00	179.752.340,00	Target Penerimaan : 244.800.000,00 Realisasi Penerimaan : 424.552.340,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : 179.752.340,00
1	01	05	1	1	06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	450.000.400,00	238.971.096,00	(211.029.304,00)	Target Penerimaan : 450.000.400,00 Realisasi Penerimaan : 238.971.096,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (211.029.304,00)
1			1	2		<u>RETRIBUSI DAERAH</u>	<u>3.697.724.728,00</u>	<u>1.683.287.107,50</u>	<u>(2.014.437.620,50)</u>	
1	10		1	2		Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.334.050.948,00	712.285.912,00	(1.621.765.036,00)	Target Penerimaan : 2.334.050.948,00 Realisasi Penerimaan : 712.285.912,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (1.621.765.036,00)
1	17	01	1	2	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.560.000,00	94.318.250,00	(6.241.750,00)	Target Penerimaan : 100.560.000,00 Realisasi Penerimaan : 94.318.250,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (6.241.750,00)
1	18	01	1	2	03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk/KK	170.000.000,00	153.033.500,00	(16.966.500,00)	Target Penerimaan : 170.000.000,00 Realisasi Penerimaan : 153.033.500,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (16.966.500,00)
1	18	01	1	2	04	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	81.500.000,00	102.726.000,00	21.226.000,00	Target Penerimaan : 81.500.000,00 Realisasi Penerimaan : 102.726.000,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : 21.226.000,00
1	16	01	1	2	07	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	14.760.000,00	5.171.000,00	(9.589.000,00)	Target Penerimaan : 14.760.000,00 Realisasi Penerimaan : 5.171.000,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (9.589.000,00)

KODE REKENING						URAIAN	JML ANGGARAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6					
1	01	05	1	2	08	Retribusi Pelayanan Pasar	47.700.000,00	41.259.650,00	(6.440.350,00)	Target Penerimaan : 47.700.000,00 Realisasi Penerimaan : 41.259.650,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (6.440.350,00)
1	16	01	1	2	09	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	26.504.000,00	35.252.200,00	8.748.200,00	Target Penerimaan : 26.504.000,00 Realisasi Penerimaan : 35.252.200,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : 8.748.200,00
1	05	01	1	2	11	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	6.325.000,00	0,00	(6.325.000,00)	Target Penerimaan : 6.325.000,00 Realisasi Penerimaan : 0,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (6.325.000,00)
1			1	2	13	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	381.120.000,00	192.013.600,00	(189.106.400,00)	Target Penerimaan : 381.120.000,00 Realisasi Penerimaan : 192.013.600,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (189.106.400,00)
1	01	05	1	2	14	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan atau Pertokoan	65.460.000,00	66.112.000,00	652.000,00	Target Penerimaan : 65.460.000,00 Realisasi Penerimaan : 66.112.000,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : 652.000,00
1	16	01	1	2	16	Retribusi Jasa Usaha Terminal	66.660.000,00	50.634.700,00	(16.025.300,00)	Target Penerimaan : 66.660.000,00 Realisasi Penerimaan : 50.634.700,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (16.025.300,00)
1	16	01	1	2	21	Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal	10.078.300,00	15.312.350,00	5.234.050,00	Target Penerimaan : 10.078.300,00 Realisasi Penerimaan : 15.312.350,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : 5.234.050,00
1	15	02	1	2	26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	116.718.480,00	121.475.018,00	4.756.538,00	Target Penerimaan : 116.718.480,00 Realisasi Penerimaan : 121.475.018,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : 4.756.538,00

KODE REKENING	URAIAN	JML ANGGARAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1 06 01 1 2 28	Retribusi Izin Gangguan	120.174.000,00	68.707.827,50	(51.466.172,50)	Target Penerimaan : 120.174.000,00 Realisasi Penerimaan : 68.707.827,50 Penerimaan Lebih (Kurang) : (51.466.172,50)
1 16 01 1 2 29	Retribusi Izin Trayek	16.324.000,00	12.592.700,00	(3.731.300,00)	Target Penerimaan : 16.324.000,00 Realisasi Penerimaan : 12.592.700,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (3.731.300,00)
1 15 02 1 2 30	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	102.400.000,00	4.650.000,00	(97.750.000,00)	Target Penerimaan : 102.400.000,00 Realisasi Penerimaan : 4.650.000,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (97.750.000,00)
1 05 01 1 2 31	Retribusi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	Target Penerimaan : 22.500.000,00 Realisasi Penerimaan : 0,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (22.500.000,00)
1 07 01 1 2 32	Retr. Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum Koperasi	5.100.000,00	7.650.000,00	2.550.000,00	Target Penerimaan : 5.100.000,00 Realisasi Penerimaan : 7.650.000,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : 2.550.000,00
1 16 01 1 2 33	Retribusi Izin Bengkel Umum dan Modifikasi Kendaraan Bermotor	9.790.000,00	92.400,00	(9.697.600,00)	Target Penerimaan : 9.790.000,00 Realisasi Penerimaan : 92.400,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (9.697.600,00)
1	<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</u>	<u>1.241.789.730,00</u>	<u>6.367.113.858,68</u>	<u>5.122.324.128,68</u>	
1 01 05 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	255.981.730,00	243.907.295,00	(12.074.435,00)	Target Penerimaan : 255.981.730,00 Realisasi Penerimaan : 243.907.295,00 Penerimaan Lebih (Kurang) : (12.074.435,00)

LAPORAN TARGET SETELAH PERUBAHAN DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2004
BULAN : DESEMBER 2004

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN LALU	JUMLAH REALISASI S/D BULAN INI	%	BERLEBIH (BERKURANG) (DARI ANGGARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN	314,589,407,612.00	32,809,156,016.55	297,023,321,431.49	329,832,477,448.04	104.85%	15,243,069,836.04	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,106,104,145.00	12,507,393,983.30	4,553,185,506.49	17,060,579,489.79	210.47%	8,954,475,344.79	
1	PAJAK DAERAH	1,010,025,122.00	210,384,159.50	1,066,303,910.93	1,276,688,070.43	126.40%	266,662,948.43	
1 01 0105 1 1 01	Pajak Hotel	144,410,040.00	13,928,550.00	95,607,925.00	109,536,475.00	75.85%	(34,873,565.00)	
1 01 0105 1 1 01 01	Hotel Melati	48,612,960.00	8,985,300.00	59,042,275.00	68,027,575.00	139.94%	19,414,615.00	
1 01 0105 1 1 01 02	Losmen/Penginapan	95,797,080.00	4,943,250.00	36,565,650.00	41,508,900.00	43.33%	(54,288,180.00)	
1 01 0105 1 1 02	Pajak Restoran/Rumah Makan	217,392,000.00	67,950,080.00	312,208,583.00	380,158,663.00	174.87%	162,766,663.00	
1 01 0105 1 1 02 01	Rumah Makan	85,392,000.00	62,092,580.00	278,308,583.00	340,401,163.00	398.63%	255,009,163.00	
1 01 0105 1 1 02 02	Warung Makan/Minum	132,000,000.00	5,857,500.00	33,900,000.00	39,757,500.00	30.12%	(92,242,500.00)	
1 01 0105 1 1 03	Pajak Hiliran	9,756,000.00	1,170,000.00	15,626,750.00	16,796,750.00	172.17%	7,040,750.00	
1 01 0105 1 1 03 01	Penyewaan/Rentel Kaset	6,460,000.00	387,000.00	4,932,000.00	5,319,000.00	82.06%	(1,161,000.00)	
1 01 0105 1 1 03 02	Permalnan Ketangkasaru/sejenisnya	756,000.00	90,000.00	6,608,500.00	6,698,500.00	886.04%	5,942,500.00	
1 01 0105 1 1 03 03	Permainan Bilyard	2,520,000.00	693,000.00	4,086,250.00	4,779,250.00	189.65%	2,259,250.00	
1 01 0105 1 1 04	Pajak Reklame	104,337,082.00	70,112,100.00	98,480,786.93	163,592,086.93	161.58%	64,255,804.93	
1 01 0105 1 1 04 01	Papan Merk	90,638,690.00	62,824,600.00	56,689,040.00	129,513,640.00	142.89%	38,874,950.00	
1 01 0105 1 1 04 02	Billboard	9,460,905.00	7,287,500.00	25,473,915.01	32,761,415.01	346.28%	23,300,510.01	
1 01 0105 1 1 04 03	Kain/Spanduk	1,705,450.00	-	5,999,175.22	5,999,175.22	351.76%	4,293,725.22	
1 01 0105 1 1 04 04	Sticker/Melekat	2,532,037.00	-	318,656.70	318,656.70	12.56%	(2,213,380.30)	
1 01 0105 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	471,060,000.00	39,837,500.00	488,110,715.00	527,948,215.00	112.08%	56,888,215.00	
1 01 0105 1 1 05 01	PLN	471,060,000.00	39,837,500.00	488,110,715.00	527,948,215.00	112.08%	56,888,215.00	
1 01 0105 1 1 05 02	Non PLN	-	-	-	-	-	-	
1 01 0105 1 1 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	63,670,000.00	17,385,920.50	56,269,151.00	73,655,080.50	116.78%	10,585,080.50	
1 01 0105 1 1 06 01	Batu	19,800,000.00	2,833,087.50	21,341,500.00	24,174,587.50	122.09%	4,374,587.50	
1 01 0105 1 1 06 02	Pasir	11,980,000.00	1,945,622.00	13,357,375.00	15,302,997.00	128.14%	3,422,997.00	
1 01 0105 1 1 06 03	Kerikil	5,400,000.00	775,420.00	8,357,440.00	9,132,860.00	169.13%	3,732,860.00	
1 01 0105 1 1 06 04	Tanah (Lap. Pertamben.)	3,240,000.00	11,831,800.00	13,212,836.00	25,044,636.00	772.98%	21,604,636.00	
1 01 0401 1 1 06 02	Pasir	8,750,000.00	-	-	-	0.03%	(8,750,000.00)	
1 01 0401 1 1 06 03	Kerikil	14,000,000.00	-	-	-	0.00%	(14,000,000.00)	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN LALU	JUMLAH REALISASI S/D BULAN INI	%	BERLEBIH (BERKURANG) (DARI ANGGARAN)	KETERANGAN
1				2	3						
1		1	2	RETRIBUSI DAERAH	5,427,300,005.00	3,802,611,103.00	1,592,830,003.00	5,495,441,106.00	101.26%	68,141,101.00	
1	10	1001	1 2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	4,305,897,580.00	3,721,920,363.00	775,737,175.00	4,497,657,538.00	104.45%	191,759,958.00	
1	10	1001			415,216,706.00	15,587,240.00	166,582,830.00	182,170,070.00	43.87%	(233,046,636.00)	
1	10	1001	1 2 01 01	Administrasi Karcis	59,764,988.00	-	11,839,400.00	11,839,400.00	19.81%	(47,925,588.00)	
1	10	1001	1 2 01 02	Tindakan Operasi	60,765,252.00	2,023,070.00	25,480,350.00	27,503,420.00	45.26%	(33,261,832.00)	
1	10	1001	1 2 01 03	Rawat Jalan	263,065,783.00	8,571,800.00	109,887,760.00	118,459,560.00	45.03%	(144,606,223.00)	
1	10	1001	1 2 01 07	PHB/Askes	12,518,317.00	4,992,370.00	19,375,320.00	24,367,690.00	194.66%	11,849,373.00	
1	10	1001	1 2 01 08	Laboratorium	19,102,366.00	-	-	-	0.00%	(19,102,366.00)	
1	10	1002		Rumah Sakit Umum Ade Moch. Djoen	3,890,680,874.00	3,706,333,123.00	609,154,345.00	4,315,487,468.00	110.92%	424,806,594.00	
1	10	1002	1 2 01 02	Tindakan/Operasi	137,364,290.00	134,336,411.00	47,919,449.00	182,255,860.00	132.68%	44,891,570.00	
1	10	1002	1 2 01 03	Rawat Jalan	114,999,240.00	75,223,300.00	35,569,600.00	110,792,900.00	96.34%	(4,206,340.00)	
1	10	1002	1 2 01 04	Rawat Inap Umum	861,341,722.00	594,585,984.00	299,531,924.00	894,117,908.00	103.81%	32,776,186.00	
1	10	1002	1 2 01 06	Obal-obatan	1,058,439,350.00	1,285,211,862.00	-	1,285,211,862.00	121.43%	226,772,512.00	
1	10	1002	1 2 01 07	PHB/Askes	148,741,200.00	351,423,330.00	10,877,670.00	362,301,000.00	243.58%	213,559,800.00	
1	10	1002	1 2 01 08	Laboratorium	231,558,288.00	111,144,970.00	47,812,402.00	158,957,372.00	68.65%	(72,600,916.00)	
1	10	1002	1 2 01 09	Radiologi	169,887,782.00	110,084,741.00	42,406,494.00	152,491,235.00	89.76%	(17,396,547.00)	
1	10	1002	1 2 01 10	Ambulance	26,606,520.00	18,535,604.00	12,356,068.00	30,891,672.00	116.11%	4,285,152.00	
1	10	1002	1 2 01 13	Instalasi Gawat Darurat	259,864,534.00	159,341,229.00	91,119,851.00	250,461,080.00	96.38%	(9,403,454.00)	
1	10	1002	1 2 01 14	USG	30,638,890.00	18,164,344.00	8,414,881.00	26,579,225.00	86.75%	(4,059,665.00)	
1	10	1002	1 2 01 15	EKG	23,166,782.00	8,437,637.00	6,155,643.00	14,593,280.00	62.99%	(8,573,502.00)	
1	10	1002	1 2 01 16	Konsultasi Gizi	70,800.00	482,079.00	258,931.00	741,010.00	1046.62%	670,210.00	
1	10	1002	1 2 01 17	Fisioterapi	1,341,600.00	826,500.00	395,000.00	1,221,500.00	91.05%	(120,100.00)	
1	10	1002	1 2 01 18	Visum et Repertum	-	1,991,750.00	488,250.00	2,480,000.00	-	2,480,000.00	
1	10	1002	1 2 01 19	Incubator	28,966,800.00	16,577,913.00	5,748,082.00	22,325,995.00	77.07%	(6,640,805.00)	
1	10	1002	1 2 01 20	BAKHP	797,376,276.00	819,823,569.00	-	819,823,569.00	-	22,447,293.00	
1	10	1002	1 2 01 21	Kamar Jenazah	316,800.00	141,900.00	100,100.00	242,000.00	76.39%	(74,800.00)	
1	17	1701	1 2 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	109,998,000.00	13,433,500.00	89,359,060.00	102,792,500.00	93.45%	(7,205,500.00)	
1	17	1701	1 2 02 01	Perkantoran	13,500,000.00	-	1,480,000.00	1,480,000.00	10.96%	(12,020,000.00)	
1	17	1701	1 2 02 02	Pertokoan/Tempat Usaha	91,080,000.00	13,433,500.00	83,979,000.00	97,412,500.00	106.95%	6,332,500.00	
1	17	1701	1 2 02 03	Perumahan	5,418,000.00	-	3,900,000.00	3,900,000.00	71.98%	(1,518,000.00)	
1	18	1802	1 2 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk/KK	170,000,000.00	12,120,000.00	166,360,000.00	178,480,900.00	104.99%	8,480,000.00	
1	18	1802	1 2 03 01	Kartu Tanda Penduduk	140,000,000.00	7,700,000.00	146,435,000.00	154,135,000.00	110.10%	14,135,000.00	
1	18	1802	1 2 03 02	Kartu Keluarga	30,000,000.00	4,420,000.00	19,925,000.00	24,345,000.00	81.15%	(5,655,000.00)	
1	18	1802	1 2 04	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	81,500,000.00	6,630,500.00	96,970,500.00	103,601,000.00	127.12%	22,101,000.00	
1	18	1802	1 2 04 01	Akte Kelahiran	62,150,000.00	4,422,500.00	60,147,560.00	64,570,000.00	103.89%	2,420,000.00	
1	18	1802	1 2 04 02	Akte Kematian	150,000.00	10,000.00	85,000.00	95,000.00	63.33%	(55,000.00)	
1	18	1802	1 2 04 03	Akte Perkawinan	19,200,000.00	2,198,000.00	36,738,000.00	38,936,000.00	202.79%	19,736,000.00	

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN LALU	JUMLAH REALISASI S/D BULAN INI	%	BERLEBIH (BERKURANG) (DARI ANGGARAN)	KETERANGAN
1	2	3						
1 15 1601 1 2 07	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10,656,000.00	787,000.00	5,832,300.00	6,619,300.00	62.12%	(4,036,700.00)	
1 16 1601 1 2 07 01	Pasar	5,760,000.00	390,000.00	4,196,300.00	4,586,300.00	79.62%	(1,173,700.00)	
1 16 1601 1 2 07 02	Pertokoan	3,816,000.00	180,000.00	1,077,000.00	1,257,000.00	32.94%	(2,559,000.00)	
1 16 1601 1 2 07 03	Rumah Sakti Umum Ade Moch. Djoen	1,080,000.00	217,000.00	559,000.00	776,000.00	71.85%	(304,000.00)	
1 01 0105 1 2 08	Retribusi Pelayanan Pasar	48,528,000.00	1,751,200.00	33,503,800.00	35,255,000.00	72.65%	(13,273,000.00)	
1 01 0105 1 2 08 01	Pelayanan Pasar Tanjung Puri	15,523,200.00	954,000.00	11,941,700.00	12,895,700.00	83.07%	(2,627,500.00)	
1 01 0105 1 2 08 02	Pelayanan Pasar Kapuas Kanan Hulu	16,300,800.00	797,200.00	13,472,100.00	14,269,300.00	87.54%	(2,031,500.00)	
1 01 0105 1 2 08 03	Pelayanan Pasar Nanga Pinoh	16,704,000.00	-	8,090,000.00	8,090,000.00	48.43%	(8,614,000.00)	
1 16 1601 1 2 09	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	33,200,000.00	2,507,000.00	35,216,000.00	37,723,000.00	113.62%	4,523,000.00	
1 16 1601 1 2 09 01	Pelayanan Pengujian	33,200,000.00	2,507,000.00	35,216,000.00	37,723,000.00	113.62%	4,523,000.00	
1 01 0105 1 2 13	Retribusi Jasa Usaha Pemakalan Kekayaan Daerah	248,641,425.00	12,765,700.00	144,826,050.00	157,591,750.00	63.38%	(91,049,675.00)	
1 01 0105 1 2 13 01	Sewa Tanah dan Bangunan	28,153,425.00	7,590,700.00	58,155,750.00	65,756,450.00	233.56%	37,603,025.00	
1 14 1401 1 2 13 02	Sewa Alat-alat Berat	150,000,000.00	-	51,050,000.00	51,050,000.00	34.03%	(98,950,000.00)	
1 01 0103 1 2 13 06	Sewa Gedung/Ruangan/Aula dan Asrama	13,248,000.00	-	14,779,000.00	14,779,000.00	111.56%	1,531,000.00	
1 05 0103 1 2 13 12	Sewa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan	55,520,000.00	5,175,000.00	20,251,300.00	25,426,300.00	45.71%	(30,193,700.00)	
1 05 0103 1 2 13 18	Sewa Perlengkapan Alat-alat Kelengkapan Gedung	1,620,000.00	-	580,000.00	580,000.00	35.80%	(1,040,000.00)	
1 01 0105 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan atau Pertokoan	77,640,000.00	9,935,000.00	72,442,200.00	82,377,200.00	106.10%	4,737,200.00	
1 01 0105 1 2 14 01	Kios Pasar Tanjung Puri	54,060,000.00	6,730,000.00	40,395,000.00	47,125,000.00	87.17%	(6,935,000.00)	
1 01 0105 1 2 14 02	Kios Pasar Kapuas Kanan Hulu	7,800,000.00	2,155,000.00	14,702,200.00	16,857,200.00	216.12%	9,057,200.00	
1 01 0105 1 2 14 03	Kios Pasar Nanga Merakai	1,440,000.00	-	1,840,000.00	1,840,000.00	127.78%	400,000.00	
1 01 0105 1 2 14 04	Kios Pasar Senaring	600,000.00	-	700,000.00	700,000.00	116.67%	100,000.00	
1 01 0105 1 2 14 05	Kios Pasar Ambalau	600,000.00	-	1,320,000.00	1,320,000.00	220.00%	720,000.00	
1 01 0105 1 2 14 06	Kios Pasar Nanga Pinoh	13,140,000.00	-	13,485,000.00	13,485,000.00	102.63%	345,000.00	
1 01 0105 1 2 14 07	Kios Pasar Serawal	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	0.00%	-	
1 16 1601 1 2 16	Retribusi Jasa Usaha Terminal	69,675,000.00	3,325,000.00	34,706,000.00	38,031,000.00	54.58%	(31,644,000.00)	
1 16 1601 1 2 16 01	Sel Durian	32,929,000.00	1,170,000.00	14,510,000.00	15,680,000.00	47.62%	(17,248,000.00)	
1 16 1601 1 2 16 02	Sel Ukei	10,920,000.00	400,000.00	5,190,000.00	5,590,000.00	51.19%	(5,330,000.00)	
1 16 1601 1 2 16 03	Tanjung Puri	10,608,000.00	740,000.00	6,640,000.00	7,380,000.00	69.57%	(3,228,000.00)	
1 16 1601 1 2 16 04	Nanga Pinoh	12,888,000.00	575,000.00	6,685,000.00	7,260,000.00	56.33%	(5,628,000.00)	
1 16 1601 1 2 16 05	Sepauk	2,016,000.00	200,000.00	990,000.00	1,190,000.00	59.03%	(826,000.00)	
1 16 1601 1 2 16 06	Nanga Mau	315,000.00	200,000.00	485,000.00	685,000.00	217.46%	370,000.00	
1 16 1601 1 2 16 07	Kota Baru	-	40,000.00	206,000.00	246,000.00	-	246,000.00	

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN LALU	JUMLAH REALISASI S/D BULAN INI	%	BERLEBIH (BERKURANG) (DARI ANGGARAN)	KETERANGAN	
1						2					7		9	
1	16	1601	1	2	21	Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal	10,958,000.00	590,000.00	10,587,700.00	11,177,700.00	102.00%	219,700.00		
1	16	1601	1	2	21	01	Bea Bandar Kapal Pedalaman	9,000,000.00	573,000.00	8,487,200.00	9,060,200.00	100.67%	60,200.00	
1	16	1601	1	2	21	02	Pemeriksaan Kapal Pedalaman	780,000.00	-	808,000.00	808,000.00	103.59%	28,000.00	
1	16	1601	1	2	21	03	Sertifikat Kapal Pedalaman	133,000.00	-	133,000.00	133,000.00	100.00%	-	
1	16	1601	1	2	21	04	Surat Tanda Registrasi Kapal Pedalaman	75,000.00	-	113,500.00	113,500.00	151.33%	38,500.00	
1	16	1601	1	2	21	05	Nomor Plat Kapal	180,000.00	-	195,000.00	195,000.00	108.33%	15,000.00	
1	16	1601	1	2	21	06	Surat Tanda Kecakapan N, M, NM	450,000.00	-	405,000.00	405,000.00	90.00%	(45,000.00)	
1	16	1601	1	2	21	07	Surat Izin Berlayar	240,000.00	17,000.00	326,000.00	343,000.00	142.92%	103,000.00	
1	16	1601	1	2	21	08	Izin Trayek Sungai	100,000.00	-	120,000.00	120,000.00	120.00%	20,000.00	
1	14	1401	1	2	26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	90,698,000.00	5,006,450.00	141,423,380.00	146,423,830.00	161.45%	55,731,830.00		
1	14	1401	1	2	26	01	Pemakaian Bahan Galian Gol. C	42,481,000.00	41,758,000.00	-	-	-	-	
1	14	1401	1	2	26	02	Lantai Bangunan	43,172,000.00	47,326,300.00	-	-	-	-	
1	14	1401	1	2	26	03	Pemeriksaan	1,750,000.00	1,250,000.00	-	-	-	-	
1	14	1401	1	2	26	04	Formulir Izin	595,000.00	462,000.00	-	-	-	-	
1	14	1401	1	2	26	05	Plat Izin Bangunan	1,350,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	
1	14	1401	1	2	26	06	Sket Lokasi	1,350,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	
						Penerimaan IMB dari Kimpraswil Bulan Januari s/d Desember 2004		92,795,300.00						
1	06	0601	1	2	28	Retribusi Izin Gangguan	120,174,000.00	9,356,390.00	57,132,095.00	66,428,425.00	55.33%	(53,685,515.00)		
1	06	0601	1	2	28	01	Izin Tepat Usaha/Izin Gangguan (HO)	106,560,000.00	9,526,390.00	50,967,095.00	59,493,485.00	55.83%	(47,066,515.00)	
1	06	0601	1	2	28	02	Tanda Daftar Perusahaan	13,614,000.00	830,000.00	6,165,000.00	6,995,000.00	51.38%	(6,619,000.00)	
1	16	0601	1	2	29	Retribusi Izin Trayek	15,594,000.00	1,867,500.00	9,228,000.00	11,095,500.00	71.15%	(4,498,500.00)		
1	16	1601	1	2	29	01	Izin Trayek	6,600,000.00	990,000.00	5,758,000.00	6,746,000.00	102.24%	148,000.00	
1	16	1601	1	2	29	02	Izin Rehab Kendaraan/Pemutakhiran Trayek	6,854,000.00	596,000.00	2,682,000.00	3,278,000.00	47.83%	(3,576,000.00)	
1	16	1601	1	2	29	03	Izin Insidental	360,000.00	-	-	-	0.00%	(360,000.00)	
1	16	1601	1	2	29	04	Kartu Pengawasan	1,000,000.00	151,500.00	528,000.00	679,500.00	67.95%	(320,500.00)	
1	16	1601	1	2	29	05	Surat Izin Usaha Angkutan Umum/SIUAU	780,000.00	130,000.00	260,000.00	390,000.00	50.00%	(390,000.00)	
1	14	1401	1	2	30	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	15,500,000.00	-	5,050,000.00	5,050,000.00	32.58%	(10,450,000.00)		
1	14	1401	1	2	30	01	Pelayanan Surat Izin	15,500,000.00	-	5,050,000.00	5,050,000.00	32.58%	(10,450,000.00)	
1	07	0701	1	2	32	Retribusi Pendirian & Pengelolaan Badan Hukum Koperasi	8,850,000.00	500,000.00	14,062,803.00	14,562,803.00	164.55%	5,712,803.00		
1	07	0701	1	2	32	01	Pelayanan Izin Koperasi	5,600,000.00	500,000.00	5,650,000.00	6,150,000.00	109.82%	550,000.00	
1	07	0701	1	2	32	02	Pembinaan Koperasi	3,250,000.00	-	8,412,803.00	8,412,803.00	258.86%	5,162,803.00	
1	16	1601	1	2	33	Retribusi Izin Bengkel Umum dan Modifikasi Kendaraan Bermotor	9,790,000.00	115,500.00	393,000.00	503,500.00	5.19%	(9,281,500.00)		
1	16	1601	1	2	33	01	Kendaraan Darat	9,350,000.00	115,500.00	393,000.00	508,500.00	5.44%	(8,841,500.00)	
1	16	1601	1	2	33	02	Kendaraan Air	440,000.00	-	-	-	0.00%	(440,000.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BULAN INI	REALISASI SD BULAN LALU	JUMLAH REALISASI SD BULAN INI	%	BERLEBIH (BERKURANG) (DARI ANGGARAN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 01 0105 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	1,668,779,018.00	8,494,398,720.80	1,794,051,592.56	10,288,450,313.36	616.53%	8,619,671,295.36	
1 01 0105 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipsahkan	219,071,018.00	13,892,390.00	490,217,744.00	504,110,134.00	230.11%	285,039,116.00	
1 01 0105 1 4 01 03	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	115,451,018.00	5,792,390.00	333,728,244.00	339,520,634.00	294.08%	224,069,616.00	
1 01 0103 1 4 01 04	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua (Ekbang)	10,000,000.00	7,200,000.00	83,600,000.00	50,800,000.00	908.00%	80,800,000.00	
1 01 0105 1 4 01 04	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	14,033,000.00	900,000.00	9,649,500.00	10,549,500.00	75.18%	(3,483,500.00)	
1 01 0105 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	79,587,000.00	-	63,240,000.00	63,240,000.00	79.46%	(16,347,000.00)	
1 01 0105 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	1,440,000,000.00	24,355,171.01	809,488,810.56	833,843,981.57	57.91%	(606,156,018.43)	
1 01 0105 1 4 02 01	Jasa Giro Kes Daerah	1,440,000,000.00	24,355,171.01	809,488,810.56	833,843,981.57	57.91%	(606,156,018.43)	
1 01 0105 1 4 07	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	9,708,000.00	800,000.00	11,601,500.00	12,401,500.00	127.75%	2,693,500.00	
1 01 0105 1 4 07 01	Kerugian Uang Daerah	9,708,000.00	800,000.00	11,601,500.00	12,401,500.00	127.75%	2,693,500.00	
1 01 0105 1 4 08	Penerimaan Lain-lain	-	8,455,351,159.79	482,743,538.00	8,938,094,697.79	-	-	
1 01 0105 1 4 08	Penerimaan Lain-lain	-	8,455,351,159.79	482,743,538.00	8,938,094,697.79	-	-	
1	DANA PERIMBANGAN	292,987,459,467.00	20,301,762,033.25	292,470,135,925.00	312,771,897,958.25	106.75%	19,784,438,491.25	
1	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	24,445,297,797.00	14,879,175,169.00	14,915,260,585.00	29,794,435,754.00	121.88%	5,349,137,957.00	
1	Bagi Hasil Pajak	23,335,673,974.00	12,565,021,965.00	9,353,878,263.00	21,918,900,228.00	93.93%	(1,416,773,746.00)	
1 05 0105 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21,574,775,974.00	10,548,960,935.00	8,461,063,089.00	19,010,024,024.00	88.11%	(2,564,751,950.00)	
1 05 0105 2 1 01 02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	617,020,000.00	1,029,019,280.00	627,276,924.00	1,656,296,204.00	268.43%	1,039,276,204.00	
1 05 0105 2 1 01 03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21,25/29)	1,143,653,000.00	987,041,750.00	265,538,250.00	1,252,580,000.00	109.52%	108,927,000.00	
1 05 0105 2 1 01 04	Pembeian Hak Atas Tanah Negara	225,000.00	-	-	-	-	(225,000.00)	
1	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,109,623,823.00	2,314,153,204.00	5,561,382,322.00	7,875,535,526.00	709.75%	6,765,911,703.00	
1 05 0501 2 1 02 01	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	-	-	-	-	-	-	
1 05 0501 2 1 02 02	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1,071,988,873.00	2,314,153,204.00	5,555,683,615.00	7,869,836,819.00	734.13%	6,797,847,946.00	
1 04 0401 2 1 02 03	Iuran Tetap/Landrent	-	-	-	-	-	-	
1 04 0401 2 1 02 04	Iuran Eksplorasi	25,797,000.00	-	-	-	-	(25,797,000.00)	
1 04 0401 2 1 02 05	Iuran Eksploitasi	5,000,000.00	-	-	-	-	(5,000,000.00)	
1 04 0401 2 1 02 10	Iuran Kuasa Usaha Pertambangan	6,837,950.00	-	5,698,707.00	5,698,707.00	83.34%	(1,139,243.00)	
1 01 0105 2 2	DANA ALOKASI UMUM	256,174,000,000.00	245,000,000.00	268,413,984,000.00	268,658,984,000.00	104.87%	12,484,984,000.00	
1 01 0105 2 2 01	Dana Alokasi Umum	256,174,000,000.00	-	266,558,993,250.00	266,558,993,250.00	104.05%	10,384,993,250.00	
	- Talangan Belanja Pegawai dan Rutin BKKBN	-	245,000,000.00	1,854,990,750.00	2,099,990,750.00	0.00%	-	
	- Talangan Belanja Pegawai dan Rutin BKKBN	-	245,000,000.00	1,854,990,750.00	2,099,990,750.00	0.00%	-	
1 01 0105 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS	7,560,000,000.00	3,024,000,000.00	4,536,000,000.00	7,560,000,000.00	100.00%	-	
1 01 0105 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	-	-	-	-	-	-	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN LALU	JUMLAH REALISASI S/D BULAN INI	%	BERLEBIH (BERKURANG) (DARI ANGGARAN)	KETERANGAN	
1							2							3	
1	01	0105	2	3	02		Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	7,560,000,000.00	3,024,000,000.00	4,536,000,000.00	7,560,000,000.00	100.00%	-		
1	01	0105	2	3	02	01	Dana Alokasi Khusus Bld. Infra Struktur	3,230,000,000.00	1,292,000,000.00	1,938,000,000.00	3,230,000,000.00	100.00%	-		
1	01	0105	2	3	02	02	Dana Alokasi Khusus Bld. Kesehatan	1,300,000,000.00	520,000,000.00	780,000,000.00	1,300,000,000.00	100.00%	-		
1	01	0105	2	3	02	03	Dana Alokasi Khusus Bld. Pendidikan	2,000,000,000.00	800,000,000.00	1,200,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00%	-		
1	01	0105	2	3	02	04	Dana Alokasi Khusus Bld. Kelautan&Perikanan	1,030,000,000.00	412,000,000.00	618,000,000.00	1,030,000,000.00	100.00%	-		
1	05	0105	2	4			BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI	4,808,161,670.00	2,153,586,864.25	4,604,891,340.00	6,758,478,204.25	140.56%	1,959,316,534.25		
1	01	0105	2	4	01		Bagi Hasil Pajak Propinsi	3,808,161,670.00	2,153,586,864.25	3,604,891,340.00	5,758,478,204.25	151.21%	1,950,316,534.25		
1	01	0105	2	4	01	01	Pajak Kendaraan Bermotor	727,009,395.00	257,989,541.00	1,033,517,869.00	1,291,507,410.00	177.65%	564,498,015.00		
1	01	0105	2	4	01	03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1,251,171,896.00	472,496,009.00	2,017,081,955.00	2,489,577,964.00	198.98%	1,238,406,068.00		
1	01	0105	2	4	01	05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,829,980,379.00	1,423,101,314.25	554,291,516.00	1,977,392,830.25	108.06%	147,412,451.25		
1	01	0105	2	4	01	06	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	0105	2	4	01	07	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	-	-	-	-	-	-	-	
1	01	0105	2	4	02		Bantuan Keuangan Dari Propinsi	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00%	-		
1	01	0105	2	4	02	01	Bantuan Keuangan Untuk Kabupaten/Kota	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00%	-		
1	01	0105	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	13,495,844,000.00	-	-	-	0.00%	(13,495,844,000.00)		
1	01	0105	3	1	01		Bantuan Dana Kontilensi /Penyeimbang dan Pemerintah	13,495,844,000.00	-	-	-	0.00%	(13,495,844,000.00)		
1	01	0105	3	1	01	01	Bantuan Keuangan untuk Kabupaten / Kota	12,239,984,000.00	-	-	-	0.00%	(12,239,984,000.00)		
1	01	0105	3	1	01	02	Bantuan Dana Hibah	1,255,860,000.00	-	-	-	-	(1,255,860,000.00)		

Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Ade M. Djoen Sintang
 * Setoran ke BUD Rp. 725.689.662,-
 * Swakelola Bulan Januari s/d Desember 2004 Rp. 3.589.797.605,-

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEMAYANAN DAERAH
 KABUPATEN SINTANG

Drs. A. SUAN RUMBAN
 PEMBINA TK. I
 NIP.520006349



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI

Nomor : 31/Kaprodi Akt./212/IV/2005

4 April 2005

Lamp. : -----

Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada
Yth. Pimpinan
Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)
Jl. Mohammad Saad, Kelurahan Tanjung Puri
Sintang, KALIMANTAN BARAT

Dengan Hormat,

Dengan ini kami memohonkan ijin bagi mahasiswa kami,

N a m a : Yovita Roseva
N I M : 01 2114 264
Program Studi : Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII

untuk melaksanakan penelitian dalam rangka tugas kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:

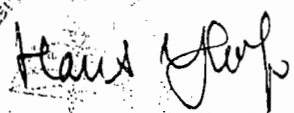
L o k a s i : Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)
Jl. Mohammad Saad Kelurahan Tanjung Puri
Sintang, Kalimantan Barat

Waktu : Bulan Mei - Agustus 2005

J u d u l : PERANAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Atas perhatian dan ijin yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Program Studi Akuntansi


Ir. Drs. F.ansiadi YH., M.Si., Akt.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan M. Saad Telp. (0565) 21201 / Fax (0565) 21389
SINTANG - 78611

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 895.02/324/SET-BPKKD/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang dengan ini menerangkan ;

- a. 1. Nama : YOVITA ROSEVA
2. N I m : 992114264
3. Program Studi : Akuntansi
4. Jurusan : Akuntansi
5. Semester : VIII
6. Universitas : Sanata Dharma Yogyakarta

- b. Bahwa sesuai surat Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor : 31/Kaprodi Akt/212/IV/2005 tanggal 4 April 2005 tentang Ijin Penelitian, yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 10 Mei 2005.

